



**PENGARUH UPAH MINIMUM (UMK) DAN TINGKAT PENDIDIKAN
TERHADAP PENGANGGURAN DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
pada Program Studi Ekonomi Syariah*

Oleh:

Tiara Kurnia Putri
NIM 2130402105

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
2025 M / 1446 H**

ABSTRAK

Tiara Kurnia Putri, NIM 2130402105. Judul Skripsi “**Pengaruh Upah Minimum (UMK) dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau**” Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Kenaikan Upah Minimum (UMK) di Kabupaten/ Kota Provinsi Riau belum memberikan dampak yang baik terhadap tenaga kerja karena masih banyak pengangguran. Tingkat Pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau cenderung meningkat setiap tahunnya, namun masih memiliki banyak pengangguran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan menggunakan teknik analisis data panel (*time series & cross section*). Pada penelitian ini yang menjadi variabel independennya yaitu upah minimum dan tingkat pendidikan sedangkan sebagai variabel dependennya yaitu pengangguran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel upah minimum (UMK) mempunyai hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2018-2023. Artinya peningkatan upah minimum belum bisa memberikan dampak terhadap penurunan pengangguran yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2018-2023. Selanjutnya variabel tingkat pendidikan mempunyai hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2018-2023. Artinya apabila tingkat pendidikan mengalami peningkatan maka akan menurunkan pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2018-2023. Sebaliknya apabila tingkat pendidikan mengalami penurunan maka akan meningkatkan pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2018-2023. Secara simultan upah minimum dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2018-2023 sebesar 77%. Ini menunjukkan bahwa variabel upah minimum dan tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang kuat terhadap variabel pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Sedangkan sisanya 23% di pengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

Kata Kunci : *Pengaruh, Upah Minimum (UMK), Tingkat Pendidikan, Pengangguran*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul “**Pengaruh Upah Minimum (UMK) dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau**”. Shalawat serta salam dikirimkan kepada junjungan umat islam sedunia yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan pedoman hidup bagi umat islam yakni Alquran dan Sunnah.

Penulisan Skripsi ini adalah untuk melengkapi syarat dan tugas dalam penyelesaian kuliah penulis untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Penulis memahami bahwa dalam penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, yang teristimewa pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tersayang, Ayahanda (Alm. Suryadi) yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh yang Maha Kuasa pada saat penulisan skripsi ini berlangsung dan Ibunda (Alm.Syarbaini) yang juga sudah terlebih dahulu dipanggil oleh yang Maha Kuasa pada saat penulis masih di bangku SMA, tidak sempat melihat penulis menggunakan toga yang mereka impikan. Terimakasih atas doa dan curahan kasih sayang yang tak terhingga sampai akhirnya penulis bisa sampai dititik ini. Semoga ini bisa membuat kedua almarhum bahagia dan bangga melihat anak bungsunya ini disurganya Allah SWT, Aamiin. Serta terimakasih kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Delmus Purneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar

2. Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan arahan kepada penulis.
3. Dr. Novia Nengsih, M.A.Ek.,CIFA selaku Ketua Program Studi dan Bapak Mohammad Aliman Shahmi, M.E selaku staf Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan bantuan demi kelancaran proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Gampito, SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan arahan, masukan dan motivasi kepada penulis.
5. Febria Rahim, S.Pd.,SE.,ME selaku Dosen pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, mencurahkan pemikiran dan tenaga dalam membimbing dan membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar mulai periode tahun ajaran 2021-2025
7. Bapak dan ibu karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah membantu dan memberikan fasilitas daftar bacaan dan panduan untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi penulis.
8. Kepada pihak Akama yang telah banyak membantu pengurusan persyaratan dalam proses penyelesaian skripsi penulis ini.
9. Kepada abang kandung penulis Indra Ardi Putra, Defia Effendi, Fairus Ariadi, dan Muhammad Deni Irwandi yang telah memberikan motivasi agar tidak mudah menyerah dan putus asa sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Kepada Yuli Family yang telah memberikan dukungan yang tak terhingga baik secara moril dan materil sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi dan terimakasih atas segala arahan dan nasehat serta dukungannya.

11. Kepada Sahabat-sahabat penulis Nurul Usyahadah, Suci Ramadhani, Elvina Putri, Dwina Andini, Sephia Oktari, Muhammad Mulyadi, Sri Nadilla, Wulan, Sania Dwi Rahmani Yufi, dan Sonya Aprimayana terimakasih atas segala dukungan, semangat, masukan, serta bantuan selama di bangku perkuliahan hingga sampai penulisan skripsi ini.

Tanpa dukungan dan motivasi dari pihak tersebut, penulis tidak akan dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Untuk itu hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga dukungan dan motivasi yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT. dengan pahala yang setimpal. Namun penulis menyadari bahwa Skripsi ini memiliki kekurangan, maka penulis berharap kepada semua pihak yang membacanya dapat memberikan kontribusi demi kesempurnaan skripsi yang telah penulis tulis, dan semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Amin

Batusangkar, Januari 2025
Penulis

Tiara Kurnia Putri
NIM. 2130402105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat dan Luaran Penelitian	10
G. Definisi Operasional	11
BAB II KAJIAN TEORI.....	12
A. Pengangguran.....	12
1. Pengertian Pengangguran.....	12
2. Teori Pengangguran	13
3. Klasifikasi Pengangguran	16
4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengangguran.....	18
5. Dampak Pengangguran	21
6. Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam	23
B. Upah Minimum	25
1. Pengertian Upah Minimum.....	25
2. Teori Upah	26
3. Upah Menurut Ekonomi Islam.....	28

4. Komponen Upah Minimum	29
5. Faktor-faktor yang Menimbulkan Perbedaan Upah	30
6. Upah Minimum dalam Perspektif Ekonomi Islam	32
7. Indikator Upah Minimum	33
8. Prinsip-Prinsip Pengupahan dalam Ekonomi Islam.....	34
C. Tingkat Pendidikan	37
1. Pengertian Pendidikan.....	37
2. Tingkat Pendidikan	38
3. Indikator Tingkat Pendidikan.....	39
4. Tingkat Pendidikan dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	39
D. Hubungan Antar Variabel	40
1. Hubungan Upah Minimum dengan Pengangguran.....	40
2. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Pengangguran	42
E. Kajian Penelitian yang Relevan	43
F. Kerangka Berpikir.....	47
G. Hipotesis.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Tempat dan Waktu Penelitian	49
C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	50
D. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	58
A. Gambaran Umum Provinsi Riau	58
B. Hasil Penelitian	65
1. Analisis Statistik Deskriptif	65
C. Analisis Data Panel	66
1. Penentuan Model Estimasi.....	66
2. Uji Asumsi Klasik.....	68
3. Hasil Estimasi Regresi Data Panel.....	71
4. Pengujian Hipotesis.....	73
D. Pembahasan Hasil Penelitian	74

BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan besarnya nilai Upah Minimum (UMK), Tingkat Pendidikan, dan Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2018-2023	6
Tabel 1. 2 Penduduk Riau Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan (2023)	7
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	49
Tabel 4. 1 Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2023 ...	60
Tabel 4. 2 Jumlah Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang di Tamatkan Tahun 2023	61
Tabel 4. 3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	65
Tabel 4. 4 Hipotesis Uji <i>Chow</i> , Uji <i>Hausman</i> dan Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	66
Tabel 4. 5 Hasil Uji <i>Chow</i>	67
Tabel 4. 6 Hasil Uji <i>Hausman</i>	67
Tabel 4. 7 Uji Multikolinearitas	69
Tabel 4. 8 Uji Heteroskedastisitas.....	70
Tabel 4. 9 Uji Autokorelasi.....	71
Tabel 4. 10 Hasil Estimasi <i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	71
Tabel 4. 11 Uji Koefisien Determinasi	73
Tabel 4. 12 Uji Parsial (Uji Statistik <i>t</i>).....	73
Tabel 4. 13 Uji Simultan (Uji <i>F</i>)	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	47
Gambar 4. 1 Peta Administrasi Provinsi Riau	59
Gambar 4. 2 Uji Normalitas	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangguran merupakan salah satu masalah pokok yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Terus meningkatnya angka pengangguran setiap tahunnya yang disebabkan oleh banyak hal. Tidak hanya karena kurangnya lapangan pekerjaan, tetapi juga karena kurangnya keterampilan dan pengetahuan akan kemajuan teknologi saat ini. (Aldi Prasetyo Amiru, dkk., 2022). Masalah pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi ada maka secara langsung akan menyerap tenaga kerja. Tetapi jika pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya hanya mampu menyerap tenaga lebih kecil dari jumlah pencari kerja, maka akan menyebabkan adanya sisa pencari kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan sehingga jumlah pengangguran di Indonesia semakin meningkat. (Dewi, 2020)

Dari data yang diperoleh Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa pengangguran di Indonesia bisa dikatakan mengalami fluktuasi atau keadaan naik turun sejak tahun 2018-2023. Jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 7.073.385 jiwa, tahun 2019 meningkat menjadi 7.104.424 jiwa, tahun 2020 meningkat menjadi 9.767.754 jiwa, tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 9.102.052 jiwa, tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 8.425.931 jiwa dan pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali dari tahun sebelumnya menjadi 7.859.275 jiwa (BPS)

Peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia disebabkan Pembangunan ekonomi Indonesia yang dilakukan selama ini belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang memadai bagi tenaga kerja yang terus meningkat. Orientasi pembangunan Indonesia selama ini masih lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang bersifat padat modal sehingga

akibatnya terjadi ketimpangan antara jumlah angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan dengan ketersediaan kesempatan kerja.

Pengangguran telah menjadi masalah yang umum terjadi di dalam suatu daerah, khususnya daerah Provinsi Riau. Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang berada di pulau Sumatra dan memiliki peran penting bagi penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hal ini mengingat potensi sumber daya alam yang melimpah terutama pada komoditi minyak bumi, gas alam, karet, dan kelapa sawit. Diharapkan dengan sumber daya alam yang dimanfaatkan secara optimal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, karena dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat. Namun kenyataannya Provinsi Riau masih menjadi salah satu provinsi yang memiliki masalah ketenagakerjaan yang cukup serius. Hal ini dapat diketahui pada data tingkat pengangguran di Provinsi Riau tahun 2018-2019 lebih tinggi dari rata-rata nasional. Tingkat pengangguran di Provinsi Riau pada tahun 2018-2019 yaitu sebesar 6,20% dan 5.97% sedangkan rata-rata nasional yaitu sebesar 5.13% dan 5.01%. Maka dari itu, ketenagakerjaan masih menjadi salah satu prioritas pemerintah yang dapat tercermin pada RPJMD tahun 2019-2024 yaitu menurunkan tingkat pengangguran terbuka (Aulia, 2020).

Salah satu faktor yang jika dilihat dari sisi penawaran tenaga kerja mempengaruhi terhadap penyerapan tenaga kerja adalah upah. Besarnya upah yang ditawarkan suatu perusahaan biasanya ditentukan oleh tingkat produktivitas, kualitas dan waktu kerja para tenaga kerja itu sendiri. Menurut peraturan pemerintah tenaga kerja dan transmigrasi no 7 tahun 2013 tentang upah minimum. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui keputusan gubernur berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan dan berlaku selama 1(satu) tahun berjalan. (Mankiw, 2000)

Menurut (Cahyani & Marhaeni, 2022) Penurunan dan kenaikan upah minimum akan mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Upah minimum yang tinggi akan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa sehingga produsen akan memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Permintaan tenaga kerja akan meningkat sehingga tingkat pengangguran menjadi berkurang.

Jika dilihat dari sisi pencari kerja, ketika upah naik maka masyarakat akan cenderung tertarik untuk bekerja sehingga terjadinya peningkatan penawaran tenaga kerja. Sebaliknya jika tingkat upah rendah maka akan mengakibatkan terjadinya pengangguran yang tinggi (Marhaeni dan Dewi, 2004).

John Maynard Keynes menjelaskan para pekerja memiliki semacam serikat tenaga kerja (*Labor union*) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Walaupun tingkat upah diturunkan (tetapi kemungkinan ini dinilai kecil sekali), tingkat pendapatan masyarakat tersebut dapat menyebabkan jumlah permintaan akan turun. Turunnya pendapatan sebagai anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan berkurang. Penurunan permintaan ini memicu produsen untuk menurunkan produksi, sehingga kebutuhan akan tenaga kerja juga menurun, serta meningkatkan pengangguran. Begitu juga sebaliknya, ketika tingkat pendapatan masyarakat meningkat dapat menyebabkan jumlah permintaan akan barang dan jasa juga meningkat. Meningkatnya pendapatan sebagai anggota masyarakat akan menyebabkan naiknya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan bertambah. Peningkatan permintaan ini memicu produsen untuk menaikkan produksi, sehingga kebutuhan akan tenaga kerja juga meningkat, serta tingkat pengangguran akan menurun (Mulyadi, 2003).

Selain penetapan upah minimum, adanya Tingkat Pendidikan juga berkontribusi terhadap angka pengangguran. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kemampuan berfikir seseorang. Karena di era

global seperti ini persaingan semakin ketat maka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa diselenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen untuk mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam sistem pendidikan nasional (Tirtarahardja, 2018).

Pendidikan memainkan peranan sangat penting yang dapat mendukung proses dan aktivitas ekonomi lainnya dalam pencapaian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena aktivitas pembangunan dapat tercapai dengan adanya pendidikan, sehingga kualitas hidup di masa depan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik (Susanto, Rochaida, & Ulfah, 2017).

Menurut (Cahyono, 2013) adanya modal manusia berupa tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memberikan tenaga kerja yang lebih berkualitas, memberikan efisiensi dan efektifitas dalam berproduksi dan memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja yang berkualitas dalam mengisi kesempatan kerja di lapangan pekerjaan. Permintaan tenaga kerja itu sendiri berasal dari instansi, lembaga, perusahaan maupun industri yang membutuhkan tenaga kerja. Salah satu ukuran permintaan tenaga kerja dalam suatu wilayah adalah dengan tingkat pendidikan, karena semakin tinggi tingkat pendidikan yang diperoleh oleh tenaga kerja maka semakin besar pula tingkat output yang dihasilkan sehingga akan mengurangi pengangguran.

Teori *Human Capital* menyatakan bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Menurut teori tersebut pendidikan adalah investasi sumber daya manusia. Pendidikan memberikan sumbangan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ketrampilan dan produktivitas kerja. Teori ini meyakini bahwa pertumbuhan suatu masyarakat harus dimulai dari produktivitas individu. Jika setiap individu produktif maka penghasilannya akan lebih tinggi, dan karena pendidikannya lebih tinggi semakin besar peluang mereka untuk

mendapatkan pekerjaan yang layak serta dapat mengurangi risiko pengangguran. Karena itu, teori ini juga menganggap bahwa pendidikan formal merupakan suatu investasi bagi individu maupun masyarakat. (Rusdiana, 2021).

Dalam al-Quran upah didefinisikan secara menyeluruh dalam sebuah ayat:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”(QS. Al- Taubah, (9): 105)

Ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada saat ini dikenal yang namanya Generasi Z atau Gen Z. Gen Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Mereka dikenal sebagai "digital natives" karena tumbuh bersama teknologi, internet, dan media sosial. Karakteristik utama Gen Z meliputi adaptabilitas tinggi terhadap teknologi, keinginan akan keterlibatan sosial dan keberagaman, serta perhatian pada isu-isu lingkungan dan kesejahteraan mental. Mereka cenderung lebih mandiri, kreatif, dan berorientasi pada pengalaman, serta mengutamakan fleksibilitas dalam pekerjaan dan pendidikan, berbeda dengan generasi sebelumnya yang lebih konvensional. Namun, tidak dapat di pungkiri bahwa banyak Gen Z yang menganggur. Salah satu faktor nya yaitu rasa malas untuk bekerja. Sehingga rasa malas bekerja tersebut dapat menjadi salah satu faktor meningkatnya pengangguran. Fenomena pengangguran di kalangan Gen Z menjadi perhatian karena meskipun generasi ini dikenal adaptif terhadap teknologi dan inovatif, menurut data yang di dapat dari Sakernas, 2023 menunjukkan TPT Gen Z di Riau sekitar 4,40% atau 81.214 orang. Sebagian besar penganggur Gen Z adalah laki-laki, dengan dominasi lulusan

SMA/SMK yang mengalami kesenjangan keterampilan dibandingkan kebutuhan industri, minimnya pengalaman kerja, atau tantangan dalam menemukan pekerjaan yang sesuai dengan aspirasi dan latar belakang pendidikan mereka. (Hanri, 2024).

Berikut Perkembangan besarnya nilai Upah Minimum (UMK), tingkat pendidikan, dan tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2018-2023 terlihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Perkembangan besarnya nilai Upah Minimum (UMK),
Tingkat Pendidikan, dan Pengangguran di Kabupaten/Kota
Provinsi Riau tahun 2018-2023

Kabupaten/Kota	Upah Minimum (UMK) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau (Rupiah)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kuantan Singingi	2.597.989,90	2.806.608,49	3.045.450,87	3.091.132,63	3.111.788,95	3.354.275,10
Indragiri Hulu	2.751.076,40	2.751.076,40	2.985.193,00	2.960.855,00	3.097.706,00	3.364.511,42
Indragiri Hilir	2.546.162,14	2.750.618,96	2.984.696,63	2.984.696,63	2.984.696,63	3.241.141,76
Pelalawan	2.561.250,65	2.766.919,08	3.002.383,89	3.002.383,89	3.030.598,54	3.287.623,60
Siak	2.600.614,14	2.809.443,46	3.048.527,10	3.081.146,33	3.114.237,83	3.361.913,16
Kampar	2.516.638,71	2.718.724,80	2.950.088,28	3.023.840,48	3.047.470,58	3.300.258,26
Rokan Hulu	2.525.823,52	2.728.647,15	2.960.855,02	2.960.855,02	2.986.863,49	3.248.333,52
Bengkalis	2.919.458,35	3.005.582,37	3.261.357,42	3.342.891,35	3.350.646,31	3.599.029,72
Rokan Hilir	2.506.141,78	2.707.384,96	2.937.783,42	2.996.539,09	3.009.416,38	3.242.977,19
Kepulauan Meranti	2.545.505,06	2.749.909,12	2.983.926,39	2.985.000,00	2.985.000,00	3.224.635,80
Pekanbaru	2.557.486,73	2.762.852,91	2.997.971,69	2.997.971,69	3.049.675,79	3.319.023,16
Dumai	2.886.655,44	3.118.453,87	3.383.834,29	3.383.834,29	3.414.160,86	3.723.278,98
Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Rata-Rata Lama Sekolah					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kuantan Singingi	8.31	8.58	8.59	8.75	8.76	8.9
Indragiri Hulu	8.16	8.17	8.38	8.39	8.4	8.42
Indragiri Hilir	7.19	7.22	7.23	7.24	7.26	7.31
Pelalawan	8.44	8.49	8.5	8.7	8.72	8.73
Siak	9.64	9.65	9.66	9.86	9.87	9.88
Kampar	9.1	9.25	9.26	9.27	9.39	9.4
Rokan Hulu	8.37	8.38	8.39	8.54	8.55	8.81
Bengkalis	9.21	9.41	9.69	9.7	9.71	9.73
Rokan Hilir	8.15	8.24	8.25	8.26	8.28	8.52
Kepulauan Meranti	7.48	7.51	7.7	7.84	7.88	7.99
Pekanbaru	11.22	11.43	11.68	11.92	11.93	11.94
Dumai	9.84	9.85	10.07	10.14	10.15	10.16
Kabupaten/Kota	Jumlah Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota (Persen)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kuantan Singingi	8,485	7,234	8,376	3,291	3,998	4,108
Indragiri Hulu	9,329	9,721	10,571	7,291	5,450	5,632
Indragiri Hilir	12,828	15,237	15,782	9,685	5,141	5,271
Pelalawan	11,134	10,639	14,223	5,915	6,721	4,497
Siak	8,636	8,764	12,292	9,745	14,338	13,253
Kampar	19,135	20,403	23,911	16,797	14,219	12,923
Rokan Hulu	15,186	14,236	13,958	7,537	12,164	9,899
Bengkalis	2,497	23,394	24,518	17,910	18,227	18,620
Rokan Hilir	17,018	13,873	13,205	9,851	15,073	14,073
Kepulauan Meranti	5,962	5,436	7,475	4,060	5,048	5,437
Pekanbaru	43,257	42,407	47,521	44,503	36,513	30,661
Dumai	7,881	9,317	12,005	9,084	7,997	8,080

Sumber: BPS Provinsi Riau

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Upah Minimum (UMK), di Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Menurut teori keynes, ketika tingkat pendapatan masyarakat meningkat dapat menyebabkan jumlah permintaan akan barang dan jasa juga meningkat. Meningkatnya pendapatan sebagai anggota masyarakat akan menyebabkan naiknya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan bertambah. Peningkatan permintaan ini memicu produsen untuk menaikkan produksi, sehingga kebutuhan akan tenaga kerja juga meningkat, serta tingkat pengangguran akan menurun. Namun yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2023, ketika tingkat pendapatan meningkat pengangguran juga meningkat sehingga tidak sesuai dengan teori keynes.

Tabel 1. 2
Penduduk Riau Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk
Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Dan Pendidikan
Tertinggi Yang Ditamatkan (2023)

Kabupaten/Kota	Pendidikan Tertinggi yang di Tamatkan						Jumlah Total
	Tidak/ Belum pernah sekolah/atau tidak/ belum tamat SD atau tamat sd	SMP	Senior High School		Diploma I/II/III	Universitas	
			SMA	SMK			
Kuantan Singingi	588	593	1755	554	0	618	4108
Indragiri Hulu	873	1389	1723	1128	172	347	5632
Indragiri Hilir	575	778	3406	0	0	512	5271
Pelalawan	0	253	3040	841	257	106	4497
Siak	1337	2681	5729	1494	267	1745	13253
Kampar	1860	1140	8607	495	0	821	12923
Rokan Hulu	2834	1546	3492	102	0	1925	9899
Bengkalis	789	471	12507	2946	571	1336	18620
Rokan Hilir	1889	1143	8290	557	0	2194	14073
Kepulauan Meranti	875	345	3750	94	0	373	5437
Pekanbaru	2047	4316	9182	5539	2161	7416	30661
Dumai	519	756	3149	2042	443	1171	8080
Jumlah Total	14186	15411	64630	15792	3871	18564	132454

Sumber: BPS Provinsi Riau

Tingkat pendidikan di Kabupaten/Kota Prvinsi Riau berdasarkan data pada tabel 1.1 juga mengalami peningkatan pada tahun 2023. Berdasarkan data pada tabel 1.2, pengangguran terbanyak berada di tingkat SMA yaitu sebanyak 64.630 orang. Menurut *Teori Human Capital*, pendidikan adalah investasi sumber daya manusia. Pendidikan memberikan sumbangan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ketrampilan dan produktivitas kerja. Teori ini meyakini bahwa pertumbuhan suatu

masyarakat harus dimulai dari produktivitas individu. Jika setiap individu produktif maka penghasilannya akan lebih tinggi, dan karena pendidikannya lebih tinggi semakin besar peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta dapat mengurangi risiko pengangguran. Karena itu, teori ini juga menganggap bahwa pendidikan formal merupakan suatu investasi bagi individu maupun masyarakat. Namun yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2023, ketika tingkat pendidikan meningkat pengangguran juga meningkat sehingga tidak sesuai dengan teori *human capital* tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Terlihat bahwa data pengangguran yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Pada data tingkat Upah Minimum (UMK) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau menurut SK UM Provinsi Riau pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan. Dan pada data Tingkat Pendidikan, dengan indikator Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2023 juga mengalami peningkatan. Dari Uraian tersebut dapat dilihat bahwa kenaikan Upah Minimum (UMK) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau dan peningkatan Tingkat Pendidikan tidak sesuai dengan teori yang telah di jelaskan karena tidak menyebabkan menurunnya tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Dari uraian masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, penulis mengidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengangguran berfluktuasi di Kabupaten/Kota Provinsi Riau dari tahun 2018-2023
2. Kenaikan Upah Minimum (UMK) di Kabupaten/ Kota Provinsi Riau belum memberikan dampak yang baik terhadap tenaga kerja karena masih

banyak pengangguran

3. Tingkat Pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau cenderung meningkat setiap tahunnya, namun masih memiliki banyak pengangguran.
4. Provinsi Riau adalah sebuah Provinsi yang kaya akan sumber daya alam dan Industri, tetapi masih terdapat banyak pengangguran
5. Persentase Pengangguran di Provinsi Riau pada tahun 2018-2019 lebih tinggi dari rata-rata nasional

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Pengaruh Upah Minimum (UMK) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau terhadap Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2018-2023
2. Pengaruh Tingkat Pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau terhadap Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2018-2023
3. Pengaruh Upah Minimum (UMK) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau terhadap Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2018-2023

D. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas masalah yang diteliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum (UMK) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau?
3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum di Kabupaten/Kota Provinsi Riau dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Riau terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum (UMK) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau
2. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau
3. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum di Kabupaten/Kota Provinsi Riau dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau

F. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian ini adalah
 - a. Manfaat penelitian bagi penulis
 - 1) Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana pada fakultas ekonomi dan bisnis islam pada Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
 - 2) Sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan penulis mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini.

- b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan wawasan pembaca tentang pengaruh Upah Minimum di Kabupaten/Kota Provinsi Riau dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Selain itu sebagai referensi bagi pembaca yang tertarik dan ingin mengkaji lebih dalam tentang penelitian ini.

- c. Bagi Almamater

Penelitian ini bertujuan sebagai rujukan mahasiswa Ekonomi Syariah selanjutnya apabila ingin meneliti permasalahan dengan kasus yang sama.

2. Luaran penelitian

Untuk diterbitkan di jurnal ilmiah dan bisa menambah khazanah bagi perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar, dan menjadi referensi bagi mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

G. Definisi Operasional

1. Pengangguran

Pengangguran merupakan situasi ketika seorang individu tidak bekerja atau tidak memperoleh pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan pendidikan yang dimiliki. Pengangguran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data tingkat pengangguran terbuka (data persentase jumlah pengangguran/jumlah angkatan kerja) yang ada di Kabupaten/ Kota Provinsi Riau tahun 2018-2023.

2. Upah Minimum (UMK)

Upah Minimum (UMK) adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau lingkungan kerjanya. Upah Minimum (UMK) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data besaran upah minimum di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2018-2023.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan jenjang atau level pendidikan yang telah dicapai oleh individu, yang biasanya diukur berdasarkan sistem pendidikan formal yang ada di suatu negara. Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data rata-rata lama sekolah masyarakat yang ada di Kabupaten/ Kota Provinsi Riau tahun 2018-2023.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengangguran

1. Pengertian Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Menurut (Sukirno, 2013) Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Fator utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut akan diperoleh apabila pengusaha tersebut dapat menjual barang dan jasa yang mereka produksi. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja.

Menurut (Mankiw, 2017) Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis.

Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai penganggur. Pengangguran juga diartikan sebagai

keadaan yang menunjukkan suatu sumber daya yang tidak digunakan (Hasyim, 2017).

2. Teori Pengangguran

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang Teori-Teori Pengangguran yaitu :

a. Teori Klasik

Teori Klasik menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena mis-alokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga.

Jadi dalam Teori Klasik jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan menjadi turun. Sehingga permintaan tenaga akan terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya tadi. Peningkatan tenaga kerja selanjutnya mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar, apabila harga relatif stabil (Gilarso, 2004).

b. Teori Keynes

Dalam menanggapi masalah pengangguran, Teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan Teori Klasik, menurut Teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Permintaan agregat yang rendah dapat disebabkan oleh upah yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang.

Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja.

Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Perlu dicermati bahwa pemerintah hanya bertugas untuk menjaga tingkat permintaan agregat, sementara penyedia lapangan kerja adalah sektor wisata. Hal ini memiliki tujuan mempertahankan pendapatan masyarakat agar daya beli masyarakat terjaga. Sehingga tidak memperparah resesi serta diharapkan mampu mengatasi pengangguran akibat resesi.

c. Teori Kependudukan dari Malthus

Teori Malthus menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melampaui pertumbuhan persediaan makanan. Malthus menyuguhkan idenya dalam bentuk yang cukup kaku. Dia mengatakan penduduk cenderung tumbuh secara “deret ukur” (misalnya, dalam lambang 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya) sedangkan persediaan makanan cenderung tumbuh secara “deret hitung” (misalnya, dalam deret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya). Dalam karyanya yang terbit belakangan, Malthus menekankan lagi tesisnya, namun tidak sekaku semula, hanya saja dia berkata bahwa penduduk cenderung tumbuh secara tidak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan. Dari kedua uraian tersebut Malthus menyimpulkan bahwa kuantitas manusia akan terjerumus ke dalam kemiskinan kelaparan. Dalam jangka panjang tidak ada kemajuann teknologi yang mampu mengalihkan keadaan karena kenaikan supply makanan terbatas sedangkan “pertumbuhan penduduk tak terbatas, dan bumi tak mampu memproduksi makanan untung menjaga kelangsungan hidup manusia”.

Apabila ditelaah lebih dalam teori Malthus ini yang menyatakan penduduk cenderung bertumbuh secara tak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan, dalam hal ini menimbulkan manusia saling bersaing dalam menjamin kelangsungan hidupnya dengan cara mencari

sumber makanan, dengan persaingan ini maka akan ada sebagian manusia yang tersisih serta tidak mampu lagi memperoleh bahan makanan. Pada masyarakat modern diartikan bahwa semakin pesatnya jumlah penduduk akan menghasilkan tenaga kerja yang semakin banyak pula, namun hal ini tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada. Karena jumlah kesempatan yang sedikit itulah maka manusia saling bersaing dalam memperoleh pekerjaan dan yang tersisih dalam persaingan tersebut menjadi golongan penganggur.

d. Teori Sosiologi Ekonomi No-Marxian

Berawal dari analisis Marx pada awal abad 20 tentang struktur dan proses ekonomi yang dapat dibayangkan sebagai sistem kapitalisme kompetitif. Industri kapitalis yang ada pada zaman itu tergolong masih kecil dan belum ada satupun yang memegang perekonomian dan mengendalikan pasar. Namun Marx yakin pada suatu saat apabila kapitalisme sudah muncul dengan demikian pesatnya maka akan memunculkan kompetisi antar industri yang menjadi semakin pesat dan kemudian menghasilkan sistem monopoli dari industri yang paling kuat dalam persaingan tersebut. Dengan munculnya monopoli modal ini maka akan ada satu perusahaan besar yang akan mengendalikan perusahaan-perusahaan lain dalam perekonomian kapitalis.

Dalam pengembangan analisis Marx yang dianut oleh para penganut Marxian yang baru ini konsep “kelas buruh “ tidak mendeskripsikan sekelompok orang atau sekelompok pekerjaan tertentu, tetapi lebih merupakan pembelian dan penjualan tenaga kerja. Para tenaga kerja tidak mempunyai alat produksi sama sekali sehingga segolongan orang terpaksa menjual tenaga mereka kepada sebagian kecil orang yang mempunyai alat produksi. Dari uraian diatas maka dapat kita telaah lagi bahwa dengan adanya pergantian antara sistem kapitalis kompetitif menjadi kearah sistem kapitalis monopoli, maka akan terdapat sebagian perusahaan yang masih tidak mampu bersaing dan menjadi terpuruk. Apabila semua proses produksi dan pemasaran

semua terpengaruh oleh sebuah perusahaan raksasa saja, maka akan mengakibatkan perusahaan kecil menjadi sangat sulit dan hal pemasaran, bisa saja perusahaan kecil tersebut mengalami kebangkrutan dan tidak lagi mampu menggaji pekerjanya. Setelah perusahaan tersebut tidak mampu beroperasi lagi, maka para pekerja yang semula bekerja dalam perusahaan tersebut menjadi tidak mempunyai pekerjaan lagi. Kemudian akhirnya pekerja tersebut menjadi pengangguran (Mankiw, 2007).

3. Klasifikasi Pengangguran

Terdapat beberapa jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya (Parera, 2020):

a. Pengangguran Friksional (*Frictional Unemployment*)

Pengangguran Friksional adalah pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau lebih sesuai dengan keinginannya. Pengangguran friksional muncul karena pekerja dan perusahaan tidak bertemu pada satu waktu yang tepat. Terdapat tiga golongan penganggur yang dapat diklasifikasikan sebagai penganggur friksional:

- 1) Tenaga kerja yang baru pertama sekali mencari kerja. Setiap tahun terdapat golongan penduduk yang mencapai usia yang tergolong sebagai angkatan kerja. Disamping itu pelajar dan sarjana yang baru menyelesaikan pelajarannya juga akan secara aktif mencari kerja. Pekerja yang meninggalkan kerja dan mencari kerja baru. Pada ketika perekonomian mencapai tingkat kegiatan yang sangat tinggi terdapat perusahaan yang menghadapi masalah untuk mendapatkan pekerja. Ini akan mendorong orang-orang yang sedang bekerja untuk meninggalkan pekerjaannya, untuk mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan pribadinya atau untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi.

- 2) Pekerja yang memasuki lagi pasaran buruh. Terdapat golongan pekerja yang dahulu telah bekerja tetapi meninggalkan angkatan kerja, memutuskan untuk bekerja kembali.

b. Pengangguran Struktural (*Structural Unemployment*)

Dalam perekonomian yang mengalami pertumbuhan akan selalu berlaku keadaan dimana beberapa industri dan perusahaan berkembang dengan cepat dan beberapa kegiatan ekonomi lainnya mengalami kemunduran. Kemunduran yang berlaku di beberapa industri ini tidaklah dapat dipandang sebagai kemerosotan kegiatan ekonomi secara keseluruhan, tetapi diakibatkan oleh kemajuan ekonomi yang berlaku. Pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan ekonomi seperti itu dinamakan pengangguran struktural.

Dalam garis besarnya ada tiga sumber utama yang menjadi penyebab berlakunya pengangguran struktural:

- 1) Perkembangan teknologi, sebelum industri komputer berkembang terdapat permintaan yang besar ke atas mesin tik dan permintaan tersebut mengembangkan industri ini. Dengan penggunaan komputer yang semakin meluas, permintaan keatas mesin tik berkurang dan industri mengalami kemunduran. Sebagian besar dalam industri ini menganggur. Pengangguran seperti ini dinamakan juga pengangguran teknologi yaitu penyebabnya adalah perkembangan teknologi.
- 2) Kemunduran yang disebabkan persaingan dari luar negeri atau dari luar daerah.
- 3) Kemunduran perkembangan ekonomi suatu kawasan sebagai akibat dari pertumbuhan yang pesat di kawasan lain (Hasyim, 2017).

c. Pengangguran siklikal

Pengangguran Siklikal yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja karena kondisi geografis, informasi, dan proses perekrutan yang panjang.

d. Pengangguran teknologi

Pengangguran Teknologi yaitu pengangguran yang terjadi karena penggunaan mesin dan kemajuan teknologi. Hal ini ditimbulkan dari adanya pergantian negara manusia oleh mesinmesin dan bahan kimia .

Adapun jenis-jenis pengangguran berdasarkan ciri-cirinya, yaitu:

a. Pengangguran terbuka

Pengangguran terbuka yaitu pengangguran yang terjadi karena lowongan pekerjaan lebih rendah dari penambahan tenaga kerja. Akibatnya, semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan.

b. Pengangguran tersembunyi

Pengangguran tersembunyi yaitu pengangguran yang terjadi karena kelebihan tenaga kerja yang digunakan. Contohnya, pelayan restoran lebih banyak dari kebutuhan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.

c. Pengangguran musiman

Pengangguran musiman yaitu pengangguran yang terjadi karena kondisi iklim yang biasanya terjadi di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau, para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya.

d. Setengah pengangguran

Setengah pengangguran yaitu pengangguran yang hanya bekerja satu sampai dua hari seminggu atau satu sampai empat jam sehari (Parera, 2020).

4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengangguran

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah menurut (Ahmadi., et al, 2023) sebagai berikut:

a. Tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar

- b. Pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil dari pada pertumbuhan angkatan kerja
- c. Upah yang rendah akibat produktivitas tenaga kerja yang rendah, sehingga mengakibatkan permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa juga rendah. Hal ini akan mengakibatkan perusahaan akan mengurangi atau bahkan menghentikan produksinya sehingga terjadi pengurangan pekerja yang akan meningkatkan pengangguran. Maka ketika upah yang ditawarkan rendah, akan meningkatkan pengangguran, begitu juga sebaliknya.

Menurut (Marji., et al, 2021) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran yaitu:

- a. Sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan
- b. Kurangnya keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja. Pendidikan merupakan sarana untuk mendapatkan keterampilan, wawasan, dan pengetahuan agar kesempatan kerja lebih luas dan mendapatkan upah yang lebih baik. Banyak Sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab makin bertambahnya angka pengangguran di suatu daerah.
- c. Kurangnya informasi, dimana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari tahu informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga kerja.
- d. Kurang meratanya lapangan pekerjaan, banyaknya lapangan pekerjaan di kota dan sedikitnya perataan lapangan pekerjaan.
- e. Masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan soft skill.
- f. Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat

pendidikan yang dibutuhkan dengan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang ada.

Menurut (Mudrajad, 2006) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran yaitu:

a. Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk merupakan rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Jika jumlah penduduk meningkat maka akan mempengaruhi tingkat pengangguran, karena jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja juga ikut meningkat. Bertambahnya penduduk yang tidak diikuti oleh penambahan lapangan kerja yang sesuai hanya akan meningkatkan tingkat pengangguran.

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi semakin meningkat maka lapangan pekerjaan baru juga akan semakin bertambah. Ketika perekonomian berkembang, maka produksi barang dan jasa juga akan meningkat. Jika hal tersebut terjadi maka kebutuhan sektor tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa juga akan meningkat. Dengan kata lain, semakin bertumbuhnya tingkat perekonomian maka akan mengurangi tingkat pengangguran.

c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja. Semakin tinggi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan semakin banyak bagian penduduk usia kerja yang ikut atau berusaha untuk ikut dalam kegiatan memproduksi barang atau jasa dalam runtun waktu tertentu.

d. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk mendapatkan keterampilan, wawasan, dan pengetahuan, agar kesempatan bekerja lebih luas dan

mendapatkan upah yang lebih baik. Masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi maka juga akan mempunyai keterampilan serta keahlian, sehingga produktivitasnya juga akan meningkat. Semakin banyak orang yang berpendidikan maka semakin sedikit pula terjadinya pengangguran.

5. Dampak Pengangguran

Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat, dan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai.

Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat tujuan dari pembangunan ekonomi. Hal ini terjadi karena pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi, diantaranya:

- a. Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang ingin di capai. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah dari pada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya)
- b. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan tersebut tidak merangsang investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau perluasan industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi
- c. Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga

pendapatan masyarakat juga akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun menurun.

Ditinjau dari sudut pandang individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Kurangnya pendapatan menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Disamping itu, pengangguran dapat mengganggu taraf kesehatan keluarga. Pengangguran yang berkepanjangan menimbulkan efek psikologi yang buruk. Selain itu, apabila keadaan pengangguran di suatu negara buruk, kekacauan politik dan sosial selalu terjadi dan menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Terlihat nyata bahwa masalah pengangguran adalah masalah buruk efeknya kepada perekonomian dan masyarakat.

Dampak dari pengangguran berimbas pada menurunnya tingkat perekonomian Negara, berdampak pada ketidakstabilan politik, berdampak pada para investor, dan pada sosial dan mental. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari pengangguran. Beberapa dampak yang timbul oleh pengangguran:

a. Ditinjau dari segi Ekonomi

Pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan. Karena banyaknya yang menganggur berdampak rendahnya pendapat ekonomi mereka. sementara biaya hidup terus berjalan. Ini akan membuat mereka tidak dapat mandiri dalam menghasilkan finansial untuk kebutuhan hidup para pengangguran.

b. Ditinjau dari segi sosial

Banyaknya pengangguran yang terjadi maka akan meningkatnya jumlah kemiskinan, dan banyaknya pengemis, gelandangan, serta pengamen. Faktor yang dapat mempengaruhi terhadap tingkat kriminal, karena sulitnya mencari pekerjaan, maka banyak orang melakukan tindak kejahatan seperti mencuri, merampok, dan lain. Pengangguran maka rendahnya kepercayaan diri, keputusan, dan akan

menimbulkan depresi.

c. Ditinjau dari segi politik

Maka akan banyaknya demonstrasi yang terjadi dan akan membuat dunia politik menjadi tidak stabil, banyaknya demonstrasi para serikat kerja karena banyaknya pengangguran yang terjadi.

d. Ditinjau dari segi keamanan

Banyaknya pengangguran membuat para penganggur melakukan tindak kejahatan demi menghidupi perekonomiannya, seperti merampok, mencuri, menjual narkoba, tindakan penipuan (Sukirno, 2004).

6. Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam

Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran. Tenaga kerja sebagai suatu faktor produksi mempunyai arti besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dikembangkan oleh manusia dan diolah oleh buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung, tetapi tanpa usaha manusia semua akan tetap tersimpan (Rahman, 1995).

Al-Qur'an memberi penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras mencari penghidupan masing-masing. Manusia harus selalu bekerja keras dan dilarang untuk bermalas-malasan, bahkan hal ini diterangkan di dalam Q.S Al-Insyirah ayat 7 yang berbunyi:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

Artinya: "Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain".

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa manusia harus bekerja, dan ketika telah selesai dari suatu pekerjaan maka harus mengerjakan pekerjaan yang lain. Pekerjaan yang dimaksud disini bukan hanya pekerjaan untuk akhirat seperti beribadah tetapi juga pekerjaan dalam

konteks dunia yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang dilarang untuk menganggur dan bermalas-malasan. Karena dengan bekerja maka hidup seseorang akan menjadi lebih makmur, kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, bahkan mereka dapat memberikan sebagian pendapatan mereka untuk orang-orang yang membutuhkan seperti orang fakir, orang miskin, dan lain sebagainya (Al-Faizin, 2018).

Menurut (Naf'an, 2014), masalah pengangguran berhubungan dengan sumber daya manusia yang tidak termanfaatkan yang disebabkan karena lapangan kerja yang terbatas atau kualitas sumber daya manusia yang berkualitas maka dibutuhkan berbagai upaya, diantaranya dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia, dengan cara memberikan pendidikan yang diorganisasikan secara formal pada tingkat dasar, menengah, dan pendidikan.

Fenomena pada masyarakat muslim saat ini, banyak pengangguran pada usia-usia produktif, dan khususnya pengangguran pada kelompok terdidik. Islam sangat mencela pengangguran yang tidak mau bekerja dengan alasan kemalasan, gaji sedikit dan kecil, serta pekerjaan yang tidak memadai.

Dalam islam pengangguran bisa disebabkan oleh dua hal yaitu:

a. Faktor individu, terdiri dari:

1) Faktor Kemalasan

Pengangguran yang berasal dari kemalasan individu sebenarnya hanya sedikit, seperti banyak orang yang miskin menjadi malas bekerja karena berharap kaya mendadak dengan jalan menang judi atau undian.

2) Faktor Cacat/Uzur

Dalam sistem kapitalis hukum yang ditetapkan adalah hukum rimba. Karena itu, tidak ada tempat bagi mereka yang cacat/uzur untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

3) Faktor Rendahnya Pendidikan Dan Keterampilan

Saat ini sekitar 75% tenaga kerja Indonesia adalah mereka yang berpendidikan rendah yaitu SD dan SMP. Dampak dari rendahnya pendidikan ini adalah rendahnya keterampilan yang mereka miliki.

b. Faktor sistem sosial dan ekonomi, diantaranya:

- 1) Ketimpangan antara penawaran tenaga kerja dan kebutuhan.
- 2) Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.
- 3) Pengembangan sektor ekonomi non-rnil.
- 4) Banyaknya tenaga kerja yang disebabkan pertumbuhan penduduk

B. Upah Minimum

1. Pengertian Upah Minimum

Menurut (Sukirno, 2013) upah diartikan sebagai pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa (jasa fisik, maupun mental) yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.

Menurut (Sumarsono, 2003) upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun keluarganya.

Upah minimum sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8/1981 merupakan Upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun sub sektoral. Dalam Hal ini upah Minimum itu adalah upah pokok dan tunjangan.

Upah pokok minimum adalah upah pokok yang diatur secara minimal baik regional, sektoral maupun sub sektoral (Sumarsono, 2003).

Dari definisi diatas, terlihat dua unsur penting yaitu:

- a. Upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima oleh buruh pada waktu pertama kali diterima bekerja.
- b. Jumlah Upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan dan keperluan rumah tangga.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa upah minimum adalah batas upah terendah yang ditetapkan pemerintah untuk menentukan standar upah yang diterima oleh karyawan dalam suatu perusahaan.

2. Teori Upah

a. Teori Ekonomi Klasik (Stopler-Samuelson)

Teori ini menunjukkan koreksi harga relatif input (upah relatif terhadap biaya *capital*) melalui liberalisasi ekonomi, akan mengarahkan alokasi faktor produksi dengan menggunakan input yang berlebih, dalam hal ini tenaga kerja. Kenaikan pangsa nilai produksi marginal tenaga ini akan meningkatkan tingkat upah riil. Dengan demikian, sebetulnya tidak akan terjadi keraguan bahwa dalam pasar yang semakin bebas, kenaikan *marginal product of labor* (produktivitas tenaga kerja) akan selalu diikuti kenaikan upah riil. Dengan demikian, penetapan upah minimum tidak berarti banyak, bahkan hanya menciptakan distorsi baru dalam perekonomian (Bawana, 2007).

b. Teori David Ricardo

Menurut teori Ricardo, jika upah pekerja/buruh suatu waktu cukup tinggi maka para pekerja akan cenderung melakukan pesta perkawinan. Akibatnya semakin tinggi tingkat kelahiran dan selanjutnya semakin meningkat juga pertumbuhan angkatan kerja yang mencari lapangan pekerjaan dan bersedia kerja walaupun upahnya ditekan serendah mungkin oleh pengusaha sampai ke tingkat substansi. Demikian terus menerus, yang dapat disimpulkan bahwa upah akan naik turun dan berkisar di atas dan di bawah upah substansi itu.

c. Teori Adam Smith

Teori ini bertitik tolak dari hukum penawaran dan permintaan pada pasar sempurna dan mobilitas tenaga kerja secara sempurna. Dalam arti bila upah di sektor pertanian, maka sebageaian pekerja akan pindah dari pertanian ke sektor industri agar memperoleh upah yang lebih besar. (Zulfikar, 2022).

d. Teori Upah Keynes

John Maynard Keynes menjelaskan para pekerja memiliki semacam serikat tenaga kerja (*Labor union*) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Kalaupun tingkat upah diturunkan (tetapi kemungkinan ini dinilai kecil sekali), tingkat pendapatan masyarakat tersebut dapat menyebabkan jumlah permintaan akan turun. Turunnya pendapatan sebagai anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan berkurang. Penurunan permintaan ini memicu produsen untuk menurunkan produksi, sehingga kebutuhan akan tenaga kerja juga menurun, serta meningkatkan pengangguran. Begitu juga sebaliknya, ketika tingkat pendapatan masyarakat meningkat dapat menyebabkan jumlah permintaan akan barang dan jasa juga meningkat. Meningkatnya pendapatan sebagai anggota masyarakat akan menyebabkan naiknya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan bertambah. Peningkatan permintaan ini memicu produsen untuk menaikkan produksi, sehingga kebutuhan akan tenaga kerja juga meningkat, serta tingkat pengangguran akan menurun. (Mulyadi, 2003).

e. Teori Upah Efisiensi

Dalam ekonomi konvensional terdapat teori upah efisiensi (*efficiency-wage*). Teori ini menyatakan upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Sebuah teori upah- efisiensi, yang lebih banyak diterapkan di negara-negara miskin menyatakan bahwa upah

mempengaruhi nutrisi. Para pekerja yang dibayar dengan upah memadai dapat membeli lebih banyak nutrisi, dan para pekerja yang lebih sehat akan lebih produktif. Teori efisiensi upah tersebut menyatakan bahwa produktivitas produksi pekerja meningkat seiring dengan tingkat upah (Abdul, 2020).

3. Upah Menurut Ekonomi Islam

Upah atau gaji merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi. Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah) adalah Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.

Upah atau gaji merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi. Upah dapat dinisbatkan pada penghasilan yang diperoleh tenaga kerja, yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang diperoleh dari seorang pekerja selama suatu jangka waktu tertentu, seperti halnya sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah dari seorang buruh tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya, yang dapat dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya sehingga pekerja diberi imbalan baik besar maupun kecil harus sebanding dengan harga nyata pekerjaannya, bukan harga nominal atas jerih payahnya.

Menurut Manan upah merupakan imbalan yang diterima oleh para pekerja, imbalan yang dimaksud dapat dilihat dari dua sisi sudut pandang yakni dari sudut pandang moneter dan bukan moneter dalam artian upah dilihat dari beberapa banyak uang yang diterima pekerja dalam masa waktu tertentu, serta kuantitas hidup para pekerja yang ia dapat karena bekerja (Abdul, 2020).

Dari makna yang ditawarkan Mannan tersebut, dapat lebih jauh didekatkan dengan upah dalam fiqh muamalah, yang masuk pada pembahasan *ijarah*, terutama yang berkaitan dengan tenaga manusia.

Upah secara garis besar dapat dikategorikan atas:

- a. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.
- b. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan jenis pertam
- c. Mengarah kepada sewa menyewa dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan

Berkenaan dengan konsep *ijarah* atas tenaga manusia maka fiqh mengatur dengan *ujrah* (upah) sebagai berikut:

- a. Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur *jihalah* (ketidakjelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama' akan tetapi ulama' Malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.
- b. Upah harus berbeda dengan jenis objeknya, mengupah suatu pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktek riba (Abdul, 2020).

4. Komponen Upah Minimum

Menurut (Sumarsono, 2003) mengatakan secara teoritis, ada tiga komponen yang dianggap mempengaruhi besarnya upah minimum yaitu sebagai berikut:

a. Kebutuhan Fisik Minimum

Kebutuhan fisik minimum adalah kebutuhan pokok dari seseorang yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi fisik dan mentalnya agar dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu faktor produksi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang minimum baik

ditinjau dari segi jumlah maupun dari segi kualitas barang dan jasa yang dibutuhkan, sehingga merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari atau dikurangi lagi. Nilai dari kebutuhan fisik minimum mencerminkan nilai ekonomi dari barang dan jasa yang diperlukan oleh pekerja dan keluarganya dalam jangka waktu satu bulan. Barang dan jasa ini dibagi dalam lima kelompok barang, yaitu: makanan dan minimum; bahan bakar, alat penerangan dan penyeduh; perumahan dan peralatan dapur; sandang dan pakaian; lain-lain termasuk didalamnya biaya transportasi, rekreasi, obat-obatan, sarana pendidikan, bacaan dan sebagainya.

b. Indeks Harga Konsumen

Indek Harga Konsumen merupakan petunjuk mengenai naik turunnya harga kebutuhan hidup. Naik turunnya harga kebutuhan hidup ini secara tidak langsung mencerminkan tingkat inflasi. Indek harga konsumen dihitung setiap bulan dan setiap tahun dinyatakan dalam bentuk persentase.

c. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan Ekonomi Daerah mencerminkan keadaan perekonomian di suatu daerah. Keadaan perekonomian ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan kondisi perusahaan yang beroperasi di daerah yang bersangkutan. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian di suatu daerah maka semakin besar pula kesempatan berkembang bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah yang bersangkutan.

5. Faktor-faktor yang Menimbulkan Perbedaan Upah

Faktor-faktor penting yang menjadi sumber dari perbedaan upah diantara pekerja-pekerja di dalam suatu jenis kerja tertentu dan diantara berbagai golongan pekerja adalah (Sukirno, 2013):

a. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam suatu jenis pekerjaan sangat besar perannya dalam menentukan upah di suatu jenis pekerjaan. Apabila penawaran tenaga kerja lebih besar daripada

permintaan tenaga kerja, maka upah cenderung untuk mencapai tingkat yang rendah.

b. Perbedaan Corak Pekerjaan

Kegiatan ekonomi dengan berbagai jenis pekerjaan. Ada pekerjaan yang dikerjakan dengan menggunakan tenaga fisik yang besar, ada pula pekerjaan yang harus dilakukan dalam lingkungan yang kurang menyenangkan.

c. Perbedaan Kemampuan, Keahlian Dan Pendidikan

Dalam perekonomian yang semakin maju kegiatan-kegiatan ekonomi semakin memerlukan tenaga kerja yang terampil. Manager profesional, tenaga teknik, tenaga akuntan dan berbagai tenaga profesional lainnya akan selalu diperlukan untuk menjalankan kegiatan produksi. Kekurangan penawaran tenaga kerja terdidik menyebabkan upah yang diperoleh lebih tinggi daripada pekerja yang lebih rendah pendidikannya.

d. Pertimbangan Bukan keuangan

Faktor-faktor bukan uang dapat mempengaruhi upah. Seseorang sering bersedia menerima upah yang lebih rendah apabila beberapa pertimbangan bukan keuangan sesuai dengan keinginannya. Sebaliknya, apabila faktor-faktor bukan keuangan banyak yang tidak sesuai dengan keinginan pekerja, akan menuntut upah yang lebih tinggi sebelum menerima pekerjaan.

e. Mobilitas Tenaga Kerja

Apabila dalam pasar tenaga kerja terjadi perbedaan upah, maka tenaga kerja akan mengalir ke pasar tenaga kerja yang lebih tinggi. Salah satu faktor yang menimbulkan perbedaan tersebut adalah ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja.

f. Faktor Geografis

Faktor geografis merupakan salah satu penyebab timbulnya ketidaksempurnaan mobilitas tenaga kerja. Adakalanya tempat-tempat tertentu terdapat masalah kekurangan buruh walaupun tingkat upah

lebih tinggi, sedangkan tempat lain terdapat pengangguran dan upah rendah.

g. Faktor Institusional

Ketidaktepurnaan mobilitas tenaga kerja disebabkan oleh faktor-faktor institusional. Di pekerjaan-pekerjaan tertentu terdapat organisasi-organisasi profesional yang membatasi masuknya tenaga profesional yang baru. Tujuannya adalah untuk menjamin supaya pendapatan mereka tetap pada tingkat yang tinggi.

6. Upah Minimum dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam islam upah disebut juga dengan *ujrah* yaitu bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Secara umum islam tidak memberikan upah berada dibawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja. Tetapi islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangan terhadap produksi.

Menurut M. A. Mannan, kebutuhan pokok yang harus dibayar oleh majikan adalah yang dapat menutup kecukupan hidup dimana standar itu bergantung pada tingkat keadaan sosio ekonomi masyarakat berkaitan. Walaupun islam menganjurkan adanya upah minimum yang dapat mencukupi kebutuhan pokok seseorang, namun islam mengakui adanya perbedaan jumlah upah itu sendiri karena ada dua faktor penentu kadar upah yaitu nilai kerja dan dan kebutuhan pekerja. Hal tersebut sesuai dengan ayat berikut:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: "Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan" (QS.Al-Ahqaf [46]: 19)

Menentukan bentuk dan jenis pekerjaan sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan melakukan pekerjaan merupakan hal yang sangat

penting. Karena akan dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan atau tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan.

Rasulullah juga memerintahkan memberi upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari Abdullah bin Umar, nabi Muhammad SAW bersabda: Artinya: "*Berikan kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.*" (HR. Ibnu Majah, shahih)

Maksud hadis ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksudkan jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan (Lestari, 2015).

7. Indikator Upah Minimum

Terbitnya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 88 ayat (4) yang menegaskan bahwa penetapan upah minimum tersebut didasarkan atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Pasal 89 ayat (2) telah dinyatakan bahwa hanya ada satu indikator dalam arah penetapan upah minimum tersebut yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sehingga ketentuan upah minimum selalu ditujukan pada pencapaian KHL dari pekerja di wilayah provinsi atau kabupaten tertentu maka terbitlah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Selanjutnya diatur dengan Peraturan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Permenakertrans No. 13 Th. 2012)

Pengaturan dalam Pasal 88 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (2) tersebut tidak dapat berjalan efektif karena sampai saat ini belum ada Peraturan Pelaksanaan (PP) dari ketentuan tersebut sehingga peraturan teknis tentang indikator untuk penetapan upah minimum didasarkan atas Permen No. 01/MEN/1999 tentang Upah Minimum yang dalam Pasal 6 ayat (1) terdapat perbedaan substansial tentang indikator penetapan upah minimum. Dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan "Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten ditetapkan dengan mempertimbangkan":

- a. Kebutuhan;
- b. Indeks Harga Konsumen (IHK);
- c. Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan;
- d. Upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antardaerah;
- e. Kondisi pasar kerja;
- f. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita.

Dari ketentuan pasal 6 ayat (1) tersebut menunjukkan bahwa selain indikator kebutuhan juga harus diperhatikan indikator-indikator lain dalam penetapan ketentuan upah minimum yang kadangkala tidak semua indikator tersebut dapat sejalan, bahkan kadangkala saling bertentangan. Seperti misalnya nilai KHL yang telah ditetapkan oleh satu provinsi atau kabupaten yang apabila dianggap terlalu tinggi oleh pengusaha akan dapat ditolak dengan argumentasi kemampuan perkembangan dan kelangsungan perusahaan yang tidak baik atau kondisi pasar kerja yang masih banyak pengangguran dan lain sebagainya. Hal sebaliknya dapat terjadi jika KHL dianggap terlalu rendah oleh pekerja, maka akan dipakai salah satu indikator lain seperti upah pada umumnya di daerah tertentu yang dianggap lebih tinggi sebagai dasar penolakan (Wiryawan, 2015).

8. Prinsip-Prinsip Pengupahan dalam Ekonomi Islam

Dalam perspektif Ekonomi Islam, prinsip pengupahan terbagi atas dua bagian, yakni sebagai berikut:

- a. Adil

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Sedangkan kata keadilan dalam bahasa arab berasal dari kata "*adala*", yang dalam Al-Quran terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata '*adl*' di dalam al-Qur'an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna '*adl*' (keadilan). Menurut M. Quraish Shihab, paling tidak ada empat makna keadilan, yakni:

Pertama, *adl* dalam arti "sama", pengertian ini yang paling banyak terdapat di dalam al-Qur'an, antara lain pada Q.S. an-Nisa' (4): 3, 58, dan 129, Q.S. asy-Syura (42): 15; Q.S. al-Ma'idah (5): 8; Q.S. an-Nahl (16): 76, 90; Q.S. al-Hujurat (49): 9. Kata '*adl*' dengan arti "sama (persamaan)" pada ayat-ayat tersebut yang dimaksud adalah persamaan di dalam hak. Di dalam Q.S. an-Nisa' (4): 58, ditegaskan, "*Wa iza hakamtum baina annasian tahkumu bi al-'adl*" yang artinya "Apabila (kamu) menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Kata '*adl*' di dalam ayat ini diartikan "sama", yang mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Ini berimplikasi bahwa manusia mempunyai hak yang sama oleh karena mereka sama sama manusia. Berdasarkan hal itu, keadilan adalah hak setiap manusia dengan sebab sifatnya sebagai manusia dan sifat ini menjadi dasar keadilan di dalam ajaran-ajaran ketuhanan.

Kedua, kata '*adl*' dalam arti "seimbang". Pengertian ini ditemukan dalam Q.S al-Ma'idah (5): 95 dan Q.S al-Infithar (82): 7. Pada ayat yang disebutkan terakhir, misalnya dinyatakan, "*Alladzi khalaqaka fasawwa kafa-'adalaka*", yang artinya: "Allah yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang". Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Sehingga jika ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Di samping itu, makna keadilan di dalam pengertian "keseimbangan", menimbulkan keyakinan bahwa Allah Yang Maha bijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan serta mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Serta mengantarkan pemahaman pada pengertian "Keadilan Ilahi".

Ketiga, kata *'adl* dalam arti "perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya". Pengertian inilah yang didefinisikan dengan "menempatkan sesuatu pada tempatnya" atau "memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Lawan dari pengertian ini adalah "kezaliman", yakni pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian ini disebutkan di dalam Q.S. al-An'am (6): 152, "*Wa Iza qultum fa'dilu walau kana za qurba*", yang artinya: "Dan apabila kamu berkata maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat(mu)". Pengertian *'adl* seperti ini melahirkan keadilan sosial.

Keempat, kata *'adl* yang diartikan dengan "yang dinisbahkan kepada Allah". "*Adl* di sini berarti mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu".

Keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebajikan-Nya. Allah memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya. Q.S. Ali Imrân (3): 18, menunjukkan bahwa Allah SWT sebagai "Qaiman bi al-qist" yang artinya "yang menegakkan keadilan".

Kata *'adl* juga digunakan untuk menyebutkan suatu keadaan yang lurus, karena secara khusus kata tersebut bermakna penetapan hukum dengan benar. Ini sesuai dengan tujuan pokok dari syari'ah yakni bertujuan untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang (Abdul, 2020)

b. Layak

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari berat kerjanya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima (Abdul, 2020).

C. Tingkat Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Menurut (Ikhsan, 2003) dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat dan kebudayaan.

Definisi pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli antara lain:

- a. Driyarkara mengatakan bahwa Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia ke taraf insani itulah yang disebut mendidik.
- b. *Dictionary of Education* menyebutkan bahwa pendidikan adalah proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat dimana ia hidup, proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum.
- c. *Crow and crow* menyebut pendidikan adalah proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskana adat dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi.

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Pendidikan adalah proses belajar dalam menumbuhkan, mengembangkan ataupun meningkatkan kemampuan dan kreativitas yang telah dimiliki seseorang.

Teori *Human Capital* menyatakan bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Menurut teori tersebut pendidikan adalah investasi sumber daya manusia. Pendidikan memberikan sumbangan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ketrampilan dan produktivitas kerja. Teori ini meyakini bahwa pertumbuhan suatu masyarakat harus dimulai dari

produktivitas individu. Jika setiap individu produktif maka penghasilannya akan lebih tinggi, dan karena pendidikannya lebih tinggi semakin besar peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta dapat mengurangi risiko pengangguran. Karena itu, teori ini juga menganggap bahwa pendidikan formal merupakan suatu investasi bagi individu maupun masyarakat. (Rusdiana, 2021).

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan atau yang sering disebut dengan jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran dan cara menyajikan bahan pengajaran. Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Selain jenjang pendidikan tersebut diselenggarakan pula pendidikan pra sekolah sebagai persiapan untuk memasuki sekolah dasar.

a. Pendidikan Pra Sekolah

Pendidikan pra sekolah diselenggarakan untuk meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan anak untuk hidup di lingkungan masyarakat serta memberikan bekal kemampuan dasar untuk memasuki jenjang sekolah dasar dan mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan sedini mungkin dan seumur hidup.

b. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.

c. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi

anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.

d. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan lanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian (Hera, 2000).

3. Indikator Tingkat Pendidikan

Menurut (Syaifuddin, 2023) indikator tingkat pendidikan terdiri dari:

a. Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditemukan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.

b. Kesesuaian Jurusan

Kesesuaian jurusan adalah sebelum karyawan direkrut terlebih dahulu perusahaan menganalisis tingkat pendidikan dan kesesuaian jurusan pendidikan karyawan tersebut agar hadir bisa ditempatkan pada posisi jabatannya yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan.

c. Kompetensi

Kompetensi adalah pengetahuan, penguasaan terhadap tugas, keterampilan dan nilai – nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.

4. Tingkat Pendidikan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pendidikan termasuk amalan yang nyata dan harus dilakukan oleh manusia. Untuk mempertahankan kemuliaannya, umat islam diperintahkan untuk menuntut ilmu dalam waktu yang tidak terbatas selama hayat dikandung badan. Pendidikan seseorang merupakan hal yang menjadi pembeda diantara yang lain dan Allah SWT mengistimewakan bagi orang-

orang yang berpendidikan/berilmu sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. al-Mujadalah ayat 11:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ
 اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
 أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya : *Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa ada orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, yaitu orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan akan nampak arif bijaksana, jiwa dan matanya akan memancarkan cahaya. Iman dan ilmu akan membuat orang mantap dan agung. Orang yang beriman dan berilmu akan memperoleh derajat yang tinggi baik di dunia maupun di akhirat (Daradjat, 2011).

D. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Upah Minimum dengan Pengangguran

Ketika pemerintah mempertahankan upah agar tidak mencapai tingkat ekuilibrium, hal itu dapat menimbulkan kekakuan upah. Undang-undang upah minimum menetapkan tingkat upah minimal yang harus dibayar perusahaan kepada para karyawannya. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Standar Kerja yang Adil tahun 1938 (*Fair Labor Standard Act Of 1938*), pemerintah federal AS memaksakan upah-minimum yang biasanya berada diantara 30 sampai 50 persen dari upah rata-rata dalam industri manufaktur. Bagi sebagian besar pekerja, upah minimum ini tidak berpengaruh, karena mereka menikmati upah diatas

upah minimum. Bagi sebagian lainnya, terutama yang tidak terdidik dan kurang berpengalaman, upah minimum meningkatkan upah mereka di atas tingkat ekuilibriumnya. Karena itu, upah minimum mengurangi jumlah tenaga kerja yang diminta perusahaan. Kebanyakan ekonom percaya bahwa kenaikan dalam upah minimum akan mengurangi kesempatan kerja di antara para pekerja dengan keahlian dan pengalaman yang rendah.

Ketika peraturan upah minimum memaksa upah tetap berada di atas tingkat upah ekuilibrium (tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan), peraturan tersebut menaikkan kuantitas pekerja yang ditawarkan dan menurunkan kuantitas pekerja yang diminta. Sehingga terjadilah surplus pekerja. Karena lebih banyak pekerja yang mau bekerja dibanding jumlah pekerja yang tersedia, sejumlah pekerja terpaksa menganggur.

Upah minimum memiliki dampak terbesar terhadap pengangguran usia muda. Upah ekuilibrium para pekerja usia muda cenderung rendah karena dua alasan. Pertama, karena para pekerja usia muda termasuk anggota angkatan kerja yang kurang terdidik dan kurang berpengalaman, mereka cenderung memiliki produktivitas marjinal yang rendah. Kedua, para pemuda seringkali mengambil sebagian dari “kompensasi” mereka dalam bentuk *on-the-job* ketimbang bayaran langsung. Untuk kedua alasan ini, upah yang menyeimbangkan penawaran pekerja usia muda dengan permintaannya adalah rendah. Karena itu upah minimum seringkali berpengaruh pada pemuda ketimbang yang lainnya dalam angkatan kerja. Upah minimum merupakan sumber perdebatan politik yang tidak ada habisnya. Para pendukung upah minimum yang lebih tinggi memandangnya sebagai sarana meningkatkan pendapatan para pekerja miskin (Mankiw, 2006).

John Maynard Keynes menjelaskan para pekerja memiliki semacam serikat tenaga kerja (*Labor union*) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Walaupun tingkat upah diturunkan (tetapi kemungkinan ini dinilai kecil

sekali), tingkat pendapatan masyarakat tersebut dapat menyebabkan jumlah permintaan akan turun. Turunnya pendapatan sebagai anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan berkurang. Penurunan permintaan ini memicu produsen untuk menurunkan produksi, sehingga kebutuhan akan tenaga kerja juga menurun, serta meningkatkan pengangguran. Jadi, menurut teori Keynes, upah minimum dan tingkat pengangguran memiliki hubungan yang negatif. Ketika Upah minimum meningkat, maka akan menurunkan tingkat pengangguran di suatu daerah. (Mulyadi, 2003).

2. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Pengangguran

Peningkatan kualitas SDM menjadi perhatian semua pihak dalam era milenium ini. Terlebih dalam suasana krisis multidimensi, masyarakat membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk menghadapi persaingan bebas, untuk itu pendidikan memegang peranan penting bagi peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki. Peningkatan Pendidikan menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan potensi dasar yang dimiliki masyarakat dan bangsa Indonesia. Peningkatan kualitas pendidikan akan memiliki makna bagi perbaikan kualitas Indonesia secara keseluruhan (Sumarsono, 2009).

Menurut (Todaro & Stephan C. Smith, 2011) Pendidikan adalah *input* (masukan) bagi fungsi produksi nasional dalam perannya sebagai komponen modal manusia (*human capital*), yang berarti investasi produktif dalam sumber daya manusia. Teori *human capital* menyatakan bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan, setiap tambahan satu tahun sekolah berarti, disatu pihak meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang. Dengan itu semakin tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka akan meningkatkan kemampuan kerja sehingga akan mendapatkan kualitas SDM yang baik dan nantinya akan mengurangi jumlah pengangguran yang ada.

Indikator kualitas SDM dapat berupa tingkat pendidikan dan tingkat penduduknya. Dengan demikian negara berkembang seperti Indonesia untuk memacu pertumbuhan ekonomi memerlukan SDM yang berkualitas. Namun, tingginya kualitas itu tidak dapat diukur dengan angka-angka semata, melainkan diukur dengan apa yang dihasilkan. Besarnya pengeluaran pemerintah dan masyarakat terhadap bidang pendidikan dan kesehatan menjadi ukuran yang menunjukkan perhatian pada usaha pengembangan kualitas SDM. Investasi SDM yang dilakukan negara-negara maju sangat menentukan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi riil (Sumarsono, 2009)

E. Kajian Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkupnya hampir sama tetapi karena objek dan periode waktu yang digunakan berbeda maka terdapat banyak hal yang tidak sama sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk saling melengkapi.

1. (Alfredo, 2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Upah Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pengangguran Di Kota Manado”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Upah Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pengangguran Di Kota Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan Upah Minimum memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap Pengangguran yang ada di Kota Manado.

Dengan kata lain semakin tinggi Upah Minimum, maka semakin menurun Pengangguran di Kota Manado. Sedangkan Indeks pembangunan dapat memberikan pengaruh yang negatif yang signifikan terhadap Pengangguran yang ada di Kota Manado, Dengan kata lain semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia, maka semakin menurunnya Pengangguran di Kota Manado. Secara simultan atau bersama-sama variabel Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan

pengaruh yang positif signifikan terhadap perkembangan jumlah Pengangguran yang ada di Kota Manado.

Persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian Alfredo., dkk terdapat variabel independen yaitu upah minimum. Dalam teknik pengumpulan data penelitian juga menggunakan sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian ini terletak pada variabel independen penulis menggunakan variabel Tingkat Pendidikan, sedangkan Alfredo., dkk menggunakan variabel Indeks Pembangunan Manusia serta tempat penelitian yang dilakukan penulis yaitu di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2018-2023, sedangkan Alfredo., dkk melakukan penelitian di Kota Manado tahun 2011-2017.

2. (Khhotimah, 2013) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan kerja, dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran di DIY Tahun 2009-2015”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan kerja, dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran di DIY. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pendidikan, angkatan kerja, dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015, tingkat pendidikan berpengaruh secara positif terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015, Sedangkan angkatan kerja dan upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015, Secara simultan tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja dan upah minimum juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015.

Persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian Khusnul Khhotimah terdapat variabel independen yaitu upah minimum dan Tingkat Pendidikan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian ini terletak pada tempat dan tahun penelitian yang dilakukan penulis yaitu di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun

2018-2023, sedangkan Khusnul Khotimah melakukan penelitian di DIY tahun 2009-2015. Penelitiannya berupa asosiatif kausal dengan menggunakan metode regresi data panel yang diolah dengan program stata.

3. (Imron, 2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran di Kabupaten Serang Dalam Persepektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran di Kabupaten Serang Dalam Persepektif Ekonomi Islam. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis statistik uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastiditas, uji autokorelasi, analisis regresi linear sederhana, uji T dan uji koefisien korelasi determinasi, dan diolah dengan menggunakan SPSS 21. Hasil penelitian ini menunjukkan Variabel Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengangguran di Kabupaten Serang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Tingkat Pendidikan maka semakin kecil tingkat pengangguran.

Persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian Imron Nawawi terdapat pada variabel independen yaitu Tingkat Pendidikan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian ini terletak pada tempat penelitian yang dilakukan penulis yaitu di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2018-2023, sedangkan Imran Nawawi melakukan penelitian di Kabupaten Serang tahun 2011-2017.

4. (Sapitri, 2018) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terdidik dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2012-2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tingkat pendidikan dan upah minimum terhadap pengangguran terdidik dalam perspektif ekonomi islam. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di Kabupaten/kota Provinsi Lampung. Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat

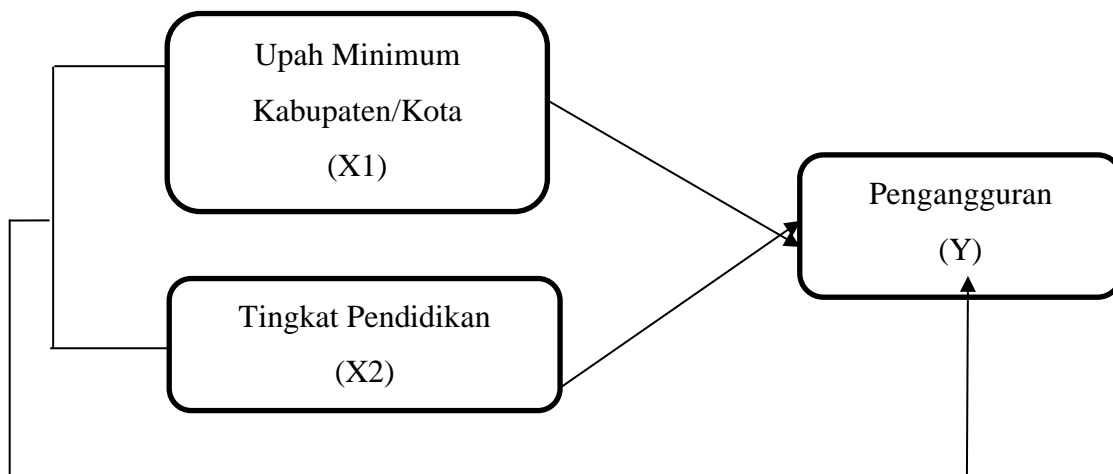
pengangguran terdidik di Kabupaten/kota provinsi Lampung.

Persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian Sapitri terdapat variabel independen yaitu upah minimum dan tingkat pendidikan. Dalam teknik pengumpulan data penelitian Sapitri juga menggunakan teknik dokumentasi dan sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian ini terletak pada variabel dependennya penulis menggunakan variabel pengangguran sebagai variabel dependen sedangkan Sapitri menggunakan pengangguran terdidik sebagai variabel dependen dan perbedaan selanjutnya terletak pada tempat penelitian yang dilakukan penulis yaitu di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2018-2023, sedangkan Sapitri melakukan penelitian di Kabupaten/kota Lampung tahun 2012-2016.

5. (Rahmat, 2023) melakukan penelitian dengan judul " Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi Dalam Negeri Dan Rasio Perbandingan Gender Terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi, investasi dalam negeri dan rasio perbandingan gender terhadap pengangguran terbuka di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek variabel upah minimum provinsi dan investasi dalam negeri berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sedangkan variabel rasio perbandingan gender berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Dalam jangka panjang variabel upah minimum provinsi dan rasio perbandingan gender berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sedangkan variabel investasi dalam negeri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Secara simultan variabel upah minimum provinsi, investasi dalam negeri dan rasio perbandingan gender berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.

Persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian Rahmat Haikal terdapat variabel independen yaitu upah minimum dan variabel dependen yaitu pengangguran. Dalam teknik pengumpulan data penelitian Rahmat Haikal juga menggunakan teknik dokumentasi dan sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian ini terletak pada variabel independen nya, penulis menggunakan variabel tingkat pendidikan sebagai variabel independen sedangkan Rahmat Haikal menggunakan variabel investasi dalam negeri dan rasio perbandingan gender sebagai variabel independen dan perbedaan selanjutnya terletak pada tempat penelitian yang dilakukan penulis yaitu di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2018-2023, sedangkan Rahmat Haikal melakukan penelitian di Indonesia dari tahun 1992-2021.

F. Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir

G. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya perlu diverifikasi. Menurut para ahli, hipotesis penting dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Berikut adalah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Ha1: Upah minimum (UMK) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau berpengaruh terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau
H01: Upah minimum (UMK) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tidak berpengaruh terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau
2. Ha2: Tingkat Pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau berpengaruh terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau
H02: Tingkat Pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tidak berpengaruh terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau
3. Ha3: Upah minimum (UMK) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau berpengaruh terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau
H03: Upah minimum (UMK) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tidak berpengaruh terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang terstruktur dan mengkuantifikasikan data untuk dapat digeneralisasikan yang memiliki kecenderungan dapat dianalisis dengan cara atau teknik statistik dan penelitian ini bersifat deskriptif (Sudaryana, 2018). Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pengolahan angka-angka yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau dengan waktu penelitian dari tahun 2018-2023 berupa data upah minimum kabupaten/kota, tingkat pendidikan dan pengangguran dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.

**Tabel 3. 1
Waktu Penelitian**

Keterangan	2024						2025	
	Feb	Maret	April	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
Pembuatan Proposal								
Pengajuan Proposal								
Bimbingan Proposal								
Seminar Proposal								
Penelitian								
Bimbingan Skripsi								
Munaqasah								

Sumber: (Data Diolah 2024)

C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel yaitu data yang dikumpulkan dari beberapa obyek dan beberapa waktu. Data panel ini didapat dari kombinasi antara data runtut waktu (*time series*) dan data dari beberapa objek dalam satu waktu (*crosssection*). Dalam penelitian ini, data panel berupa data upah minimum, tingkat pendidikan dan pengangguran menurut kabupaten/kota di Provinsi Riau sebanyak 12 kabupaten/kota dengan jenjang waktu 6 tahun terakhir dari tahun 2018-2023. Sehingga data panel dalam penelitian ini sebanyak $12 \times 6 = 72$ objek penelitian.

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder, dalam suatu penelitian pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi seperti laporan tahunan, dokumentasi yang dimiliki oleh perusahaan, buku tentang teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Martono, 2012). Data dalam penelitian ini didapatkan dari data yang telah dikumpulkan dari Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau.

D. Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan penelitian maka diperlukan teknis analisis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data upah minimum kabupaten/kota, tingkat pendidikan dan pengangguran tahun 2018-2023 dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian yang ada dalam model regresi. Pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah:

a. Uji Normalitas

Menurut Winarno uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi berdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan uji signifikan 0.05.

1) Jika Sig $>0,05$ maka data berdistribusi normal.

2) Jika Sig $<0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui adanya hubungan antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dalam model regresi. Uji Multikolinearitas yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2018). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak orthogonal. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam regresi adalah dengan cara sebagai berikut:

Jika nilai koefisien korelasi (R^2) $> 0,80$, maka data tersebut terjadi multikolinearitas.

Jika nilai koefisien korelasi (R^2) $< 0,80$, maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk melakukan uji apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk penelitian ini yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk memastikan bahwa analisis regresi yang dilakukan menghasilkan estimasi yang akurat dan dapat diandalkan. Uji Durbin-Watson (DW) adalah metode statistik yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam residual dari model regresi. Autokorelasi terjadi ketika nilai residual dari pengamatan tertentu berkorelasi dengan nilai residual dari pengamatan lainnya, yang dapat mengganggu validitas model regresi. Kriteria Pengambilan Keputusan:

- 1) Jika $d_w < d_L$: Hipotesis nol ditolak, terdapat autokorelasi positif.
- 2) Jika $d_w > (4 - d_L)$: Hipotesis nol ditolak, terdapat autokorelasi negatif.
- 3) Jika d_w berada antara d_U dan $(4 - d_U)$: Tidak ada kesimpulan yang pasti tentang autokorelasi.
- 4) Jika d_w berada antara d_L dan d_U atau $(4 - d_U)$ dan $(4 - d_L)$: Tidak ada autokorelasi (Ghozali, 2018).

2. Analisis Regresi Data Panel

Data panel (*pooled data*) atau yang disebut juga data longitudinal merupakan gabungan antara data cross section dan data time series. Data cross section adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. sedangkan data time series merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Model persamaan regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{it 1} + \beta_2 X_{it 2} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y = Tingkat Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau (%)

β_0 = Konstanta

β_{1-2} = Koefisien Regresi

$X_{it\ 1}$ = Variabel Upah Minimum pada unit i pada periode t (Rupiah)

$X_{it\ 2}$ = Variabel Tingkat Pendidikan pada unit i pada periode t (Tahun)

ε_{it} = Error atau variabel pengganggu

Dalam penelitian ini data yang diolah yaitu menggunakan data *logaritma natural* (Ln), data dalam variabel ini di Ln kan karena memiliki satuan yang berbeda-beda, oleh karena itu diperlukan transformasi untuk menyamakan satuan. Satuan variabel pengangguran adalah persen, satuan variabel upah minimum adalah Rupiah dan satuan variabel tingkat pendidikan adalah tahun. Untuk itu di perlukan transformasi *logaritma natural* (Ln). Transformasi bertujuan untuk memperkecil nilai koefisien yang dihasilkan karena perbedaan satuan antar variabel. Logaritma natural (Ln) digunakan dalam penelitian untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan.

$$\text{Ln}Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Ln}X_{it\ 1} + \beta_2 \text{Ln}X_{it\ 2} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y = Tingkat Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau

β_0 = Konstanta

β_{1-2} = Koefisien Regresi

$X_{it\ 1}$ = Variabel Upah Minimum pada unit i pada periode t

$X_{it\ 2}$ = Variabel Tingkat Pendidikan pada unit i pada periode t

ε_{it} = Error atau variabel pengganggu

Ln= *Logaritma Natural*

Penelitian ini menggunakan eviews 12 untuk menguji datanya. Estimasi model yang menggunakan data panel dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu metode *Pooled Least Square (Common Effect)*, metode efek tetap (*Fixed Effect*) dan metode efek acak (*Random Effect*). Adapun

penjelasan mengenai ketiga model estimasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Metode *Pooled Least Square (Common Effects)*

Model ini dikenal dengan estimasi *common effects* yaitu teknik regresi yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel dengan cara hanya mengkombinasi data *time series* dan *cross section*. Model ini hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu sehingga dapat dikatakan bahwa model ini sama halnya dengan model *Ordinary Least Square (OLS)* karena menggunakan kuadrat terkecil biasa.

b. Metode Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effects*)

Pendekatan model ini menggunakan variabel *dummy* yang dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effects*) atau *Least Square Dummy Variabel* atau disebut juga dengan *Covariance Model*. *Fixed effect* dapat menunjukkan perbedaan antar objek meskipun dengan koefisien regresor yang sama. Model ini merupakan model yang mengasumsikan koefisien *slope* konstan tetapi *intersep* bervariasi antar anggota panel.

c. Metode Pendekatan Efek Acak (*Random Effects*)

Dalam model efek acak, parameter-parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukkan ke dalam error, karena hal inilah model efek acak juga disebut model komponen error (*Error Component Model*). Dengan menggunakan model efek acak ini, maka dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada model efek tetap.

Keputusan pemakaian *common effects model*, *fixed effect model* ataupun *random effect model* ditentukan dengan uji chow, uji hausman, dan uji Lagrange multiplier (LM) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Uji chow dilakukan untuk melihat model manakah yang lebih tepat, model *common effect* atau *fixed effect* dengan hipotesis sebagaiberikut:

H_0 : *Common Effect Model*

H1 : *Fixed Effect Model*

Jika nilai prob. > 0.05 (H0 diterima)

Jika nilai prob. $< 0,05$ (H0 ditolak)

- b. Uji hausman dilakukan dengan tujuan untuk melihat manakah yang lebih tepat antara *fixed effect model* atau *random effect model*.

H0 : *Random Effect Model*

H1 : *Fixed Effect Model*

Jika nilai prob. $> 0,05$ (H0 diterima)

Jika nilai prob. $< 0,05$ (H0 ditolak)

- c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji LM digunakan untuk memilih apakah model *Common Effect* atau *Random Effect* yang lebih tepat digunakan dalam model persamaan regresi data panel. Metode yang sering dipakai dalam uji Langrange Multiplier menggunakan metode Breusch Pagan. Kriteria pengambilan keputusannya adalah jika nilai $(\text{Prob}>\chi^2) > 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Common Effect*, dan sebaliknya apabila nilai $(\text{Prob}>\chi^2) < 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Random Effect*.

3. Uji Signifikansi

Uji Signifikansi digunakan untuk menentukan tingkat signifikansi dari masing-masing koefisien regresi variabel bebas terhadap variabel terikat dapat digunakan uji statistik seperti uji koefisien determinasi, uji t, dan uji F.

- a. Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien Determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui persentase kesesuaian atau ketetapan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dalam suatu persamaan regresi. Dengan mengetahui nilai koefisien determinasi kita akan bisa menjelaskan kebaikan dalam model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Terdapat dua jenis koefisien determinasi: Koefisien determinasi biasa (*R Square*) dan koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R Square*). Pada regresi berganda, penggunaan

koefisien determinasi yang telah disesuaikan lebih baik dalam melihat seberapa baik model dibandingkan koefisien determinasi. Koefisien determinasi disesuaikan (*Adjusted R Square*) merupakan hasil penyesuaian koefisien determinasi terhadap tingkat kebebasan dari persamaan prediksi. Hal ini melindungi dari kenaikan bias atau kesalahan karena kenaikan dari jumlah variabel independen dan kenaikan dari jumlah sampel (Purnomo, 2019)

b. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini yaitu apakah variabel upah minimum (UMK) dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Langkah-langkah dalam uji t adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($n-k-1$) maka menerima hipotesis nol (H_0) artinya variabel upah minimum (UMK) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau dan tingkat pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tidak berpengaruh terhadap pengangguran di Kabupaten Provinsi Riau
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($n-k-1$) maka menolak hipotesis nol (H_0) dan menerima hipotesis alternatif (H_2), maka secara parsial dapat dibuktikan bahwa semua variabel bebas upah minimum (UMK) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau dan tingkat pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau berpengaruh terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau
- 3) Jika probabilitas ($\text{sig } t$) $> \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan jika probabilitas ($\text{sig } t$) $< \alpha$ (0,05) maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

c. Uji Statistik F

Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua

variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikan variabel upah minimum (UMK) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau dan tingkat pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Langkah-langkah dalam uji F adalah sebagai berikut: secara simultan.

- 1) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($k-1-n-k$) maka diterima hipotesis nol (H_0) artinya secara statistik dapat dibuktikan bahwa semua variabel bebas upah minimum (UMK) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau dan tingkat pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tidak berpengaruh terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau
- 2) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($k-1-n-k$) maka menolak hipotesis nol (H_0) dan menerima hipotesis alternatif (H_2), artinya secara simultan dapat dibuktikan bahwa semua variabel bebas upah minimum (UMK) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau dan tingkat pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau berpengaruh terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau.
- 3) Jika Probabilitas (sig_t) $> \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan Probabilitas (sig_t) $< \alpha$ (0,05) maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat (Eviatiwi, 2022).

BAB IV

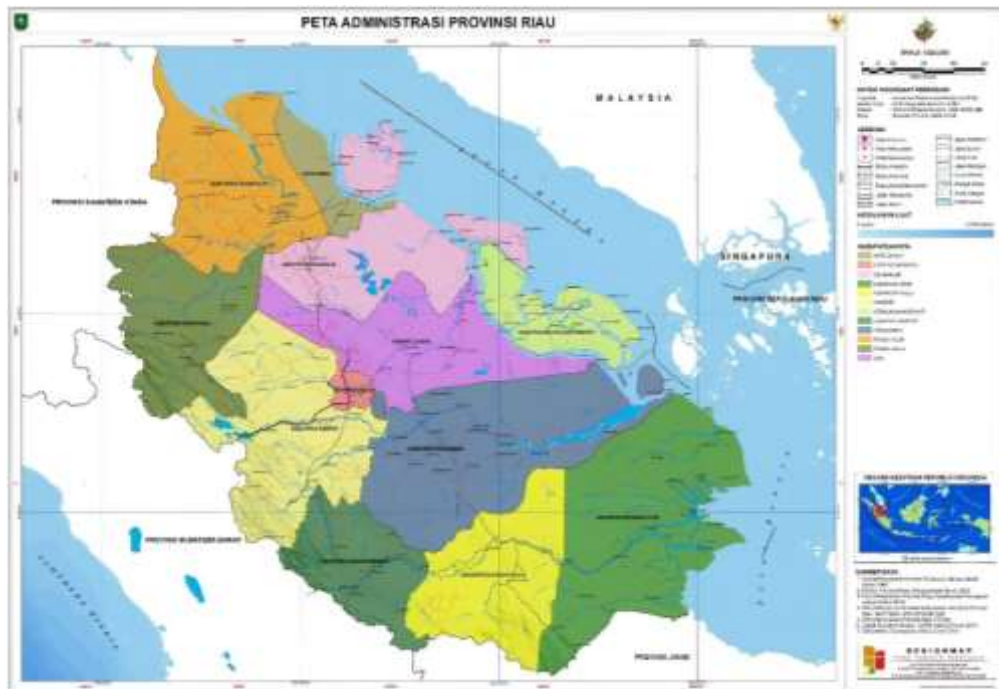
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Riau

Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Sumatera. Provinsi ini terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera, yaitu di sepanjang pesisir Selat Melaka. Hingga tahun 2004, provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil (pulau-pulau utamanya antara lain Pulau Batam dan Pulau Bintan) yang terletak di sebelah timur Sumatera dan sebelah selatan Singapura. Kepulauan ini dimekarkan menjadi provinsi tersendiri pada Juli 2004.

Riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan serat. Tetapi, penebangan hutan yang merajalela telah mengurangi luas hutan secara signifikan, dari 78% pada 1982 menjadi hanya 33% pada 2005. Rata-rata 160,000 hektar hutan habis ditebang setiap tahun, meninggalkan 22%, atau 2,45 juta hektar pada tahun 2009. Deforestasi dengan tujuan pembukaan kebun-kebun kelapa sawit dan produksi kertas telah menyebabkan kabut asap yang sangat mengganggu di provinsi ini selama bertahun-tahun, dan menjalar ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Secara administratif, Provinsi Riau terdiri dari 12 Kabupaten/Kota. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten terluas di Provinsi Riau, dengan luas wilayah mencapai 13.521,26 km². Kabupaten ini dikenal sebagai penghasil kelapa dan memiliki berbagai potensi pertanian lainnya. Sedangkan kota Pekanbaru memiliki luas terkecil yaitu 638,33 km².



Gambar 4. 1
Peta Administrasi Provinsi Riau

1. Geografi

Provinsi Riau terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera, dengan letak geografis yang strategis. Luas wilayah provinsi Riau adalah 89.935,9 km². Berikut adalah rincian letak geografis Provinsi Riau:

Letak Astronomis

Lintang: 01° 05'00" LS hingga 02° 25'00" LU

Bujur: 100° 00'00" BT hingga 105° 05'00" BT

Batas Wilayah

Utara: Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara

Selatan: Provinsi Jambi dan Sumatera Barat

Timur: Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka

Barat: Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara

Tabel 4. 1
Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Riau Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (KM ²)
Kuantan Singingi	5457.86
Indragiri Hulu	7871.85
Indragiri Hilir	13521.26
Pelalawan	13262.11
Siak	7805.54
Kampar	10352.8
Rokan Hulu	7658.15
Bengkalis	8616.36
Rokan Hilir	9068.46
Kepulauan Meranti	3623.56
Pekanbaru	638.33
Dumai	2059.61
RIAU	89935.9

2. Sumber daya alam

Provinsi ini memiliki sumber daya alam, baik kekayaan yang terkandung di perut bumi, berupa minyak bumi dan gas, serta emas, maupun hasil hutan dan perkebunannya. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, secara bertahap mulai diterapkan sistem bagi hasil atau perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah. Aturan baru ini memberi batasan tegas mengenai kewajiban penanam modal, pemanfaatan sumber daya, dan bagi hasil dengan lingkungan sekitar.

3. Kependudukan

Jumlah penduduk provinsi Riau berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau tahun 2023 sebesar 6.642.874 jiwa. Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk 1,12 juta jiwa, sedangkan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kabupaten Kepulauan Meranti yakni sebesar 238.000 jiwa.

4. Pengangguran

Pada tahun 2023, jumlah pengangguran di Riau mencapai 132.454 jiwa. Pengangguran terbanyak berasal dari tamatan SMA, dengan jumlah pengangguran mencapai 64.630 jiwa untuk lulusan SMA dan 18.564 jiwa untuk lulusan universitas. Pengangguran tertinggi dalam kurun waktu 2018-2023 ditempati oleh Kota Pekanbaru dengan jumlah pengangguran pada tahun 2020 adalah 47.521 jiwa. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan jumlah pengangguran terendah adalah Kabupaten Bengkalis yaitu pada tahun 2018 dengan jumlah pengangguran sebanyak 2.497 jiwa.

Tabel 4. 2
Jumlah Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang di Tamatkan Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Pendidikan Tertinggi yang di Tamatkan						Jumlah Total
	Tidak/ Belum pernah sekolah/atau tidak/ belum tamat SD atau tamat sd	SMP	Senior High School		Diploma I/II/III	Universitas	
			SMA	SMK			
Kuantan Singingi	588	593	1755	554	0	618	4108
Indragiri Hulu	873	1389	1723	1128	172	347	5632
Indragiri Hilir	575	778	3406	0	0	512	5271
Pelalawan	0	253	3040	841	257	106	4497
Siak	1337	2681	5729	1494	267	1745	13253
Kampar	1860	1140	8607	495	0	821	12923
Rokan Hulu	2834	1546	3492	102	0	1925	9899
Bengkalis	789	471	12507	2946	571	1336	18620
Rokan Hilir	1889	1143	8290	557	0	2194	14073
Kepulauan Meranti	875	345	3750	94	0	373	5437
Pekanbaru	2047	4316	9182	5539	2161	7416	30661
Dumai	519	756	3149	2042	443	1171	8080
Jumlah Total	14186	15411	64630	15792	3871	18564	132454

5. Upah

Upah di Provinsi Riau menunjukkan variasi yang mencerminkan kondisi ekonomi dan sektor pekerjaan di daerah tersebut. Untuk pekerja di sektor konstruksi, rata-rata upah bersih per bulan pada Februari 2023 adalah Rp3,63 juta, meningkat dari tahun sebelumnya. Sektor pertambangan dan penggalian memberikan gaji tertinggi dengan penghasilan bersih bulanan mencapai Rp4,71 juta, sementara sektor penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki gaji terendah sekitar Rp1,83 juta per bulan. Upah minimum (UMK) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau cenderung mengalami kenaikan. Kabupaten/Kota yang memiliki Upah minimum (UMK) tertinggi dalam kurun waktu 2018-2023

ditempati oleh Kota Dumai yaitu sebesar Rp3.723.278,98 pada tahun 2023. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan Upah minimum (UMK) terendah adalah Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebesar Rp2.506.141,78 pada tahun 2018.

6. Pendidikan

Tingkat pendidikan yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah). Tingkat pendidikan penduduk Provinsi Riau umumnya hanya mencapai pendidikan menengah. Data Susenas 2023 menunjukkan bahwa 32,58 persen penduduk 15 tahun ke atas adalah tamat SM/ sederajat, dan hanya sekitar 11,41 persen penduduk yang berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang Perguruan Tinggi (PT).

Tingkat pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau cenderung mengalami kenaikan. Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat pendidikan tertinggi dalam kurun waktu 2018-2023 ditempati oleh Kota Pekanbaru yaitu selama 11.94 tahun pada tahun 2023. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan tingkat pendidikan terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu selama 7.19 tahun pada tahun 2018.

7. Perekonomian

Ekonomi Riau tumbuh sebesar 4,21% pada tahun 2023, lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan 4,55% yang tercatat pada tahun 2022. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai sektor, terutama konstruksi, transportasi, dan informasi.

PDRB Riau atas dasar harga berlaku mencapai Rp1.026,47 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp551,83 triliun. Riau menempati posisi ke-6 sebagai provinsi dengan PDRB terbesar di Indonesia dan berkontribusi sekitar 5% terhadap perekonomian nasional Pertanian & perkebunan

Struktur PDRB Riau didominasi oleh sektor industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 27,55%, diikuti oleh pertanian, kehutanan, dan

perikanan (26,30%), serta pertambangan dan penggalian (19,78%). Sektor konstruksi juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 9,17%, menjadikannya sebagai sektor dengan pertumbuhan tertinggi

Riau merupakan salah satu penghasil utama komoditas seperti *crude palm oil* (CPO), kertas, dan minyak bumi. CPO menjadi andalan ekspor dengan kontribusi lebih dari 72% dari total nilai ekspor

8. Industri dan Pertambangan

Pada provinsi ini terdapat beberapa perusahaan berskala internasional yang bergerak di bidang minyak bumi dan gas serta pengolahan hasil hutan dan sawit. Selain itu terdapat juga industri pengolahan kopra dan karet. Beberapa perusahaan besar tersebut diantaranya Chevron Pacific Indonesia anak perusahaan Chevron Corporation, PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk di Perawang, dan PT. Riau Andalan Pulp & Paper di Pangkalan Kerinci. Hasil pertambangan provinsi Riau adalah Minyak bumi, Gas, dan Batu Bara.

9. Suku Bangsa

Penduduk provinsi Riau terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Mereka terdiri dari Jawa (25,05%), Minangkabau (11,26%), Batak (7,31%), Banjar (3,78%), Tionghoa (3,72%), dan Bugis (2,27%). Suku Melayu merupakan masyarakat terbesar dengan komposisi 37,74% dari seluruh penduduk Riau. Mereka umumnya berasal dari daerah pesisir di Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, hingga ke Pelalawan, Siak, Inderagiri Hulu dan Inderagiri Hilir. Namun begitu, ada juga masyarakat asli bersuku rumpun Minangkabau terutama yang berasal dari daerah Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, dan sebagian Inderagiri Hulu. Juga masyarakat Mandailing di Rokan Hulu, yang lebih mengaku sebagai Melayu daripada sebagai Minangkabau ataupun Batak. Abad ke-19, masyarakat Banjar dari Kalimantan Selatan dan Bugis dari Sulawesi Selatan, juga mulai berdatangan ke Riau. Mereka banyak bermukim di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Tembilahan. Di bukanya perusahaan pertambangan minyak Caltex pada tahun 1940-an di Rumbai, Pekanbaru,

mendorong orang-orang dari seluruh Nusantara untuk mengadu nasib di Riau.

Suku Jawa dan Sunda pada umumnya banyak berada pada kawasan transmigran. Sementara etnis Minangkabau umumnya menjadi pedagang dan banyak bermukim pada kawasan perkotaan seperti Pekanbaru, Bangkinang, Duri, dan Dumai. Begitu juga orang Tionghoa pada umumnya sama dengan etnis Minangkabau yaitu menjadi pedagang dan bermukim khususnya di Pekanbaru, serta banyak juga terdapat pada kawasan pesisir timur seperti di Bagansiapiapi, Selatpanjang, Pulau Rupat dan Bengkalis.

10. Pemerintahan

Berdasarkan surat keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 nomor 258/M/1958 diangkat Mr. S.M. Amin, sebagai Gubernur pertama provinsi Riau yang dilantik pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang.

11. Hutan dan Ikan

Pembangunan kehutanan pada hakekatnya mencakup semua upaya memanfaatkan dan memantapkan fungsi sumber daya alam hutan dan sumber daya alam hayati lain serta ekosistemnya, baik sebagai pelindung dan penyangga kehidupan dan pelestarian keanekaragaman hayati maupun sebagai sumber daya pembangunan. Namun dalam realitanya tiga fungsi utamanya sudah hilang, yaitu fungsi ekonomi jangka panjang, fungsi lindung, dan estetika sebagai dampak kebijakan pemerintah yang lalu.

Hilangnya ketiga fungsi diatas mengakibatkan semakin luasnya lahan kritis yang diakibatkan oleh pengusahaan hutan yang mengabaikan aspek kelestarian. Efek selanjutnya adalah semakin menurunnya produksi kayu hutan non HPH, sementara upaya reboisasi dan penghijauan belum optimal dilaksanakan. Masalah lain yang sangat merugikan tidak saja provinsi Riau pada khususnya tapi Indonesia pada umumnya, adalah masalah *illegal logging* yang menyebabkan berkurangnya kawasan hutan (BPS Provinsi Riau, 2022).

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan suatu metode statistika yang digunakan untuk melihat pemusatan dan penyebaran dari data tanpa mengambil kesimpulan. Analisis deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan ukuran terhadap data dalam bentuk numerik yang berlaku secara umum dan akan digunakan sebagai data penelitian. Berdasarkan hasil pengolahan nilai statistik deskriptif variabel pengangguran, upah minimum, dan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Pengangguran	UMK	Tingkat Pendidikan
Mean	5.129167	2999910	8.972083
Max	10.05000	3723279	11.94000
Min	1.500000	2506142	7.190000
Std. Dev	1.945694	0.121082	0.806517
Obs	72	72	72

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12 (2024)

Pengangguran merupakan variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini. Pengukuran pengangguran didasarkan pada jumlah pengangguran yang di dapat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Berdasarkan tabel 4.3 dari 72 observasi diperoleh nilai rata-rata (*mean*) pengangguran adalah sebesar 5.13 dengan pengangguran maksimum sebesar 10.05 serta pengangguran minimum sebesar 1.50. Sementara standar deviasi pada variabel pengangguran dalam penelitian ini sebesar 1.95.

Upah minimum (UMK) merupakan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel 4.1 dari 72 observasi diperoleh nilai rata-rata (*mean*) Upah minimum (UMK) adalah sebesar 2.999.910 dengan Upah minimum (UMK) maksimum sebesar 3.723.279 serta Upah minimum (UMK) minimum sebesar 2.506.142.

Sementara standar deviasi pada variabel Upah minimum (UMK) dalam penelitian ini sebesar 0.12.

Tingkat Pendidikan merupakan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini. Pengukuran tingkat pendidikan didasarkan pada data rata-rata lama sekolah yang di dapat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Berdasarkan tabel 4.1 dari 72 observasi diperoleh nilai rata-rata (*mean*) tingkat pendidikan adalah sebesar 8.97 dengan tingkat pendidikan maksimum sebesar 11.94 serta tingkat pendidikan minimum sebesar 7.19 Sementara standar deviasi pada variabel tingkat pendidikan dalam penelitian ini sebesar 0.81.

C. Analisis Data Panel

1. Penentuan Model Estimasi

Penentuan model estimasi dapat dilakukan dengan 3 uji yaitu uji *chow*, uji *hausman* dan uji *lagrange multiplier*. Penggunaan uji tersebut dapat membantu memilih model terbaik yang akan digunakan. Berikut pengujian hipotesis pada pengujian masing-masing uji.

Tabel 4. 4
Hipotesis Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier

Alat Pengujian	Hipotesis	Ketentuan	Keterangan
Uji Chow	H0 = menggunakan common effect model.	Jika nilai p-value $> \alpha$ maka H0 diterima.	Model yang digunakan adalah common effect model
	H1 = menggunakan fixed effect model.	Jika nilai p-value $< \alpha$ maka H0 ditolak.	Model yang Digunakan adalah fixed effect model.
Uji Hausman	H0 = menggunakan random effect model.	Jika nilai p-value $> \alpha$ maka H0 diterima.	Model yang Digunakan adalah random effect model.
	H1 = menggunakan fixed effect model.	Jika nilai p-value $< \alpha$ maka H0 ditolak.	Model yang Digunakan adalah fixed effect model.
Uji Lagrange	H0 =	Jika nilai p-	Model yang

Multiplier	menggunakan common effect model atau pooled least square.	value $> \alpha$ maka H0 diterima.	Digunakan Adalah common effect model.
	H1 = menggunakan random effect model.	Jika nilai p-value $< \alpha$ maka H0 ditolak.	Model yang Digunakan adalah random effect model.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data panel dengan menggunakan tiga model estimasi yaitu *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM) dan *random effect model* (REM). Untuk menentukan mana di antara tiga model tersebut yang paling tepat digunakan uji *Chow*, uji *Hausman* dan uji *Lagrange Multiplier* sebagai alat estimasi (Eviatiwi, 2022).

Tabel 4. 5
Hasil Uji Chow

Uji Chow	Statistik	D.F	Probabilitas
Cross-section F	10.894666	(11.58)	0.0000
Coss-section Chi-Square	80.672306	11	0.0000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12 (2024)

Berdasarkan tabel 4.5, menunjukkan bahwa nilai prob 0.0000 $<$ 0.05 maka model yang terpilih yaitu *Fixed Effect Model* (FEM)

Tabel 4. 6
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. D.F	Probability
Coss-section Random	14.734651	2	0.0006

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12 (2024)

Berdasarkan tabel 4.6, menunjukkan bahwa nilai prob 0.0006 $<$ 0.05 maka model yang terpilih yaitu *Fixed Effect Model* (FEM). Maka, dari hasil pengujian uji *Chow* dan uji *Hausman* menunjukkan model terbaik yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

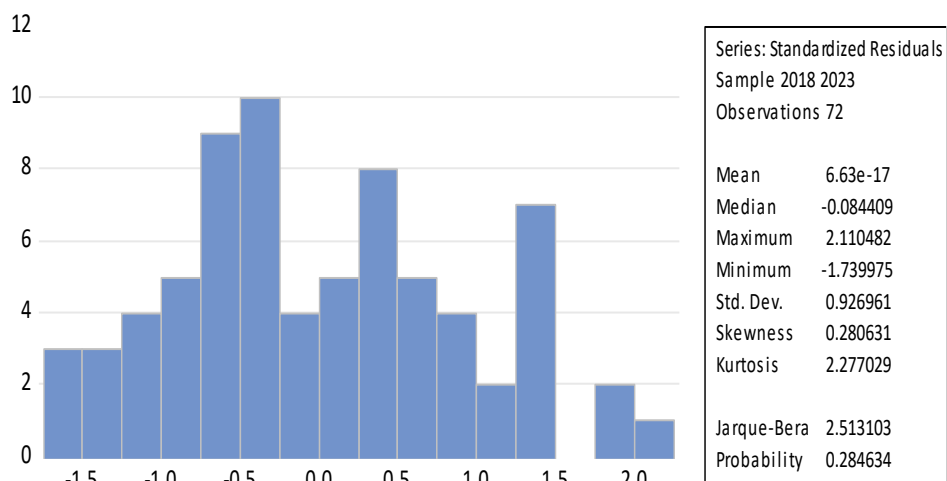
2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian yang ada dalam model regresi. Pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan uji signifikan 0.05 (Ghozali, 2018).

- 1) Jika $Sig > 0,05$ maka data berdistribusi normal.
- 2) Jika $Sig < 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.



Gambar 4. 2
Uji Normalitas

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12 (2024)

Berdasarkan tabel 4.2, Hasil yang diperoleh dari uji normalitas menunjukkan nilai probability sebesar 0.28 lebih dari 0.05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi

antar variabel independen (Ghozali, 2018). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak orthogonal. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam regresi adalah dengan cara sebagai berikut:

- 1) Jika nilai koefisien kolerasi (R^2) $> 0,80$, maka data tersebut terjadi multikolinearitas.
- 2) Jika nilai koefisien kolerasi (R^2) $< 0,80$, maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4. 7
Uji Multikolinearitas

	X1	X2
X1	1	0.303063
X2	0.303063	1

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12 (2024)

Berdasarkan tabel 4.7, Hasil yang diperoleh dari uji multikolinearitas menunjukkan nilai korelasi antar variabel independen (upah minimum (UMK) dan tingkat pendidikan) sebesar 0.30 kurang dari 0.80. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Uji Glejser adalah meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independen. Menurut (Ghozali, 2018) dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_a ditolak, H_0 diterima yang artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas.

- 2) Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak, H_a diterima yang artinya ada masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4. 8
Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID)
Method: Panel Least Squares
Date: 01/09/25 Time: 01:34
Sample: 2018 2023
Periods included: 6
Cross-sections included: 12
Total panel (balanced) observations: 72

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-7.910428	12.07818	-0.654935	0.5151
X1	0.303590	1.419158	0.213923	0.8314
X2	1.901169	6.615696	0.287372	0.7749

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12 (2024)

Berdasarkan tabel 4.8, Hasil yang diperoleh dari uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser (residual absolut) menunjukkan bahwa variabel upah minimum (X1) dan tingkat pendidikan (X2) tidak terjadi heteroskedastisitas hal ini dibuktikan nilai variabel X1 yaitu 0.83 lebih besar dari 0.05 dan nilai variabel X2 yaitu 0.77 lebih besar dari 0.05. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk memastikan bahwa analisis regresi yang dilakukan menghasilkan estimasi yang akurat dan dapat diandalkan. Uji Durbin-Watson (DW) adalah metode statistik yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam residual dari model regresi. Autokorelasi terjadi ketika nilai residual dari pengamatan tertentu berkorelasi dengan nilai residual dari pengamatan lainnya, yang dapat mengganggu validitas model regresi. Kriteria Pengambilan Keputusan:

- 1) Jika $d_w < d_L$: Hipotesis nol ditolak, terdapat autokorelasi positif.
- 2) Jika $d_w > (4 - d_L)$: Hipotesis nol ditolak, terdapat autokorelasi negatif.

- 3) Jika d_w berada antara d_U dan $(4 - d_U)$: Tidak ada kesimpulan yang pasti tentang autokorelasi.
- 4) Jika d_w berada antara d_L dan d_U atau $(4 - d_U)$ dan $(4 - d_L)$: Tidak ada autokorelasi (Ghozali, 2018).

Tabel 4. 9
Uji Autokorelasi

R-squared	0.773027	Mean dependent var	5.129167
Adjusted R-squared	0.722154	S.D. dependent var	1.945694
S.E. of regression	1.025597	Akaike info criterion	3.061093
Sum squared resid	61.00727	Schwarz criterion	3.503778
Log likelihood	-96.19934	Hannan-Quinn criter.	3.237327
F-statistic	15.19516	Durbin-Watson stat	1.816388
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12 (2024)

Berdasarkan tabel 4.9, diketahui nilai Durbin Watson adalah 1.816. Daerah bebas autokorelasi untuk jumlah sampel (n) 72 dan jumlah variabel independen (k) 2. Untuk nilai d_U adalah 1.6751 (d_U) dan 2.3249 untuk nilai $(4-d_U)$. Jadi, $d_U < d_w < 4-d_U$ ($1.6751 < 1.816 < 2.3249$), maka dapat dikatakan untuk model ini tidak mengalami autokorelasi.

3. Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil uji *chow* dan uji *hausman* menunjukkan model regresi data panel yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil estimasi regresi menggunakan *Fixed Effect Model* sebagai berikut:

Tabel 4. 10
Hasil Estimasi *Fixed Effect Model* (FEM)

	C	UMK (X1)	TP(X2)
Koefisien	114.4697	-2.939491	-29.96469
Standar.Error	23.75547	2.791212	13.01180
T – Statistik	4.818667	-1.053124	-2.302886
Probabilitas	0.0000	0.2967	0.0249
R – Squared	0.773027		
Adj R – Squared	0.722154		
Probabilitas (<i>F- Statistik</i>)	0.000000		
F- Statistik	15.19516		

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12 (2024)

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dijelaskan hasil dari pengolahan data dengan menggunakan pendekatan *Fixed effect model*, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\mathbf{LnY = \beta_0 - \beta_1 LnX_{it\ 1} - \beta_2 LnX_{it\ 2} + \varepsilon_{it}}$$

$$\mathbf{LnY = 114.47\beta_0 - 2.94 X_{it\ 1} - 29.96 X_{it\ 2} + \varepsilon_{it}}$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas, maka dapat dijelaskan bahwa:

- a. Nilai konstanta sebesar 114.47 artinya jika variabel bebas yaitu upah minimum (X1) dan tingkat pendidikan (X2) dianggap konstan (tetap) maka tingkat pengangguran (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2018-2023 akan meningkat sebesar 114.47%
- b. Nilai koefisien upah minimum (X1) sebesar -2.94. Hal ini menunjukkan bahwa variabel upah minimum (X1) memiliki hubungan yang negatif terhadap tingkat pengangguran (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2018-2023, Artinya setiap kenaikan upah minimum (X1) sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat pengangguran (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau sebesar 2.94%.
- c. Nilai koefisien tingkat pendidikan (X2) sebesar -29.96. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan (X2) memiliki hubungan yang negatif terhadap tingkat pengangguran (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2018-2023, Artinya setiap kenaikan tingkat pendidikan (X2) sebesar 1% akan menurunkan pengangguran (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau sebesar 29.96%.

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4. 11
Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.773027	Mean dependent var	5.129167
Adjusted R-squared	0.722154	S.D. dependent var	1.945694
S.E. of regression	1.025597	Akaike info criterion	3.061093
Sum squared resid	61.00727	Schwarz criterion	3.503778
Log likelihood	-96.19934	Hannan-Quinn criter.	3.237327
F-statistic	15.19516	Durbin-Watson stat	1.816388
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12 (2024)

Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *R-squared* dari model regresi. Hasil dari uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.11. Hasil yang diperoleh dari uji koefisien determinasi dengan nilai *R-squared* sebesar 0.773027, artinya pengaruh upah minimum (X1) dan tingkat pendidikan (X2) terhadap tingkat pengangguran (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2018-2023 adalah sebesar 77%. Sedangkan sisanya 23% variabel pengangguran dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

b. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Tabel 4. 12
Uji Parsial (Uji Statistik t)

No	Variabel	Nilai Signifikansi (prob)	α	keterangan
1	UMK	0.2967	0,05	TIDAK BERPENGARUH
2	Tingkat Pendidikan	0.0249	0,05	BERPENGARUH

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12 (2024)

1) Variabel upah minimum (X1) memiliki *P-value* sebesar 0.2967 > 0.05 dengan nilai *t-statistik* sebesar 1.05 < 1.99 (*t-tabel*). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara upah minimum (X1) dengan pengangguran (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2018-2023.

2) Variabel tingkat pendidikan (X2) memiliki *P-value* sebesar $0.0249 < 0.05$ dengan nilai *t*-statistik sebesar $2.30 > 1.99$ (*t*-tabel). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan (X2) dengan pengangguran (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2018-2023.

c. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 4. 13
Uji Simultan (Uji F)

	Nilai
F-Statistik	15.19516
Prob (F-Statistik)	0.000000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12 (2024)

Berdasarkan hasil pada tabel 4.13, menunjukkan nilai *F*- statistik sebesar $15.195 > 3.129$ (*F*-tabel) dengan probabilitas sebesar $0.000000 < 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel upah minimum (X1) dan variabel tingkat pendidikan (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2018-2023.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Upah Minimum (UMK) Terhadap Tingkat Pengangguran

Berdasarkan hasil dari analisis regresi pada penelitian ini menemukan bahwa upah minimum (UMK) memiliki nilai signifikansi sebesar $0.2967 > 0.05$ dengan nilai *t*-statistik sebesar $1.05 < 1.99$ (*t*-tabel). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara upah minimum(X1) dengan tingkat pengangguran (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2018-2023. Dengan hasil koefisien sebesar -2.94, hal ini menyatakan bahwa adanya hubungan negatif antara upah minimum (UMK) dengan tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau, yang berarti apabila upah minimum (UMK) meningkat, maka akan menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau.

Penelitian ini di dukung oleh teori keynes, yang menyatakan ketika tingkat pendapatan (upah) masyarakat meningkat dapat menyebabkan

jumlah permintaan akan barang dan jasa juga meningkat. Meningkatnya pendapatan sebagai anggota masyarakat akan menyebabkan naiknya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan bertambah. Peningkatan permintaan ini memicu produsen untuk menaikkan produksi, sehingga kebutuhan akan tenaga kerja juga meningkat, serta tingkat pengangguran akan menurun (Mulyadi, 2003).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmat, 2023). Hasil penelitian oleh Rahmat Haikal menunjukkan bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang Upah Minimum memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran yang ada di Indonesia dari tahun 1992-2021. Hal ini berarti naik dan turunnya upah minimum, belum memberikan dampak pada penurunan pengangguran di Indonesia dikarenakan pengaruhnya yang tidak signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alfredo, 2018). Hasil penelitian oleh Alfredo menunjukkan bahwa Upah Minimum memiliki hubungan negatif terhadap Pengangguran yang ada di Kota Manado. Dengan kata lain semakin tinggi Upah Minimum, maka semakin menurun Pengangguran di Kota Manado.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khhotimah, 2013). Hasil penelitian oleh Khusnul Khhotimah menunjukkan bahwa upah minimum memiliki hubungan negatif terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015. Artinya semakin tinggi Upah Minimum, maka semakin menurun Pengangguran di DIY pada tahun 2009-2015.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sapitri, 2018). Hasil penelitian oleh Sapitri menunjukkan bahwa Upah Minimum memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/kota provinsi Lampung. Hal ini berarti semakin tinggi Upah Minimum, maka semakin meningkat Pengangguran di Kabupaten/kota provinsi Lampung.

Dari hasil olahan data dapat diketahui bahwa upah minimum (UMK) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tidak berpengaruh terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2018-2023. Hal ini berarti meningkatnya upah minimum belum memberikan dampak terhadap penurunan tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2018-2023. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti : Biaya produksi dikarenakan meningkatnya upah minimum dapat meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Hal ini sering kali memaksa perusahaan untuk mengurangi jumlah pekerja atau menunda perekrutan baru, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau, sehingga meningkatnya upah minimum tidak berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2018-2023. Faktor lainnya yaitu substitusi tenaga kerja, upah minimum yang lebih tinggi dapat mendorong perusahaan untuk mengganti pekerja yang memiliki keterampilan rendah dengan pekerja yang lebih terampil untuk menjaga efisiensi biaya, sehingga mengurangi kesempatan kerja bagi pekerja dengan keterampilan rendah. Secara keseluruhan, meskipun upah minimum ditetapkan untuk melindungi pekerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka, namun di Kabupaten/Kota Provinsi Riau, kebijakan ini tidak efektif dalam mengurangi pengangguran. Ketidakseimbangan antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja serta dampak negatif dari kenaikan biaya produksi menjadi faktor utama yang menyebabkan upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2018-2023 .

2. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran

Berdasarkan hasil dari analisis regresi pada penelitian ini menemukan bahwa tingkat pendidikan memiliki nilai signifikansi sebesar $0.0249 < 0.05$ dengan nilai t-statistik sebesar $2.30 > 1.99$. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat

pendidikan (X2) dengan pengangguran (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2018-2023. Dengan hasil koefisien sebesar -29.96, hal ini menyatakan bahwa adanya hubungan negatif antara tingkat pendidikan dengan pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau, yang berarti apabila tingkat pendidikan meningkat, maka akan menurunkan pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *Human Capital*, yang menyatakan bahwa pendidikan adalah investasi sumber daya manusia. Pendidikan memberikan sumbangan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ketrampilan dan produktivitas kerja. Teori ini meyakini bahwa pertumbuhan suatu masyarakat harus dimulai dari produktivitas individu. Jika setiap individu produktif maka penghasilannya akan lebih tinggi, dan karena pendidikannya lebih tinggi semakin besar peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta dapat mengurangi risiko pengangguran. Karena itu, teori ini juga menganggap bahwa pendidikan formal merupakan suatu investasi bagi individu maupun masyarakat (Rusdiana, 2021). Jadi, dapat disimpulkan bahwa menurut teori *human capital*, semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan menurunkan tingkat pengangguran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Imron, 2020). Penelitian oleh Imron menunjukkan bahwa Variabel Tingkat Pendidikan memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran di Kabupaten Serang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Tingkat Pendidikan maka semakin kecil tingkat pengangguran.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sapitri, 2018). Hasil penelitian oleh Sapitri menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/kota Provinsi Lampung. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan meningkatkan pengangguran di Kabupaten/kota Provinsi Lampung. Hasil

penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khhotimah, 2013). Hasil penelitian oleh Khusnul menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan positif terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan meningkatkan pengangguran di DIY tahun 2009-2015.

Dari hasil olahan data dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2018-2023. Hal ini berarti apabila tingkat pendidikan yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Riau meningkat, maka akan menurunkan pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Hal ini juga terkait dengan peluang pekerjaan yang lebih luas bagi angkatan kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Riau yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi terutama di sektor-sektor yang memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang lebih tinggi seperti Provinsi Riau yang memiliki banyak sektor industri. Maka dari itu, diperlukan kesadaran masing-masing individu yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Riau untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan mereka agar sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga pengangguran yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Riau selalu menurun setiap tahun nya.

3. Pengaruh Upah Minimum (UMK) dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran

Berdasarkan hasil dari analisis uji F simultan pada penelitian ini menemukan bahwa upah minimum (UMK) dan tingkat pendidikan memiliki nilai F-statistik sebesar $15.195 > 3.129$ (F-tabel) dengan probabilitas sebesar $0.000000 < 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel upah minimum (X1) dan variabel tingkat pendidikan (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau pada tahun 2018-2023

sebesar 77% dan sisanya 23% di pengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori *Human Capital*, yang menyatakan bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Menurut teori tersebut pendidikan adalah investasi sumber daya manusia. Pendidikan memberikan sumbangan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ketrampilan dan produktivitas kerja. Teori ini meyakini bahwa pertumbuhan suatu masyarakat harus dimulai dari produktivitas individu. Jika setiap individu produktif maka penghasilannya akan lebih tinggi, dan karena pendidikannya lebih tinggi semakin besar peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta dapat mengurangi risiko pengangguran. Karena itu, teori ini juga menganggap bahwa pendidikan formal merupakan suatu investasi bagi individu maupun masyarakat. (Rusdiana, 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khhotimah, 2013). Penelitian oleh Khusnul Khotimah menunjukkan bahwa secara simultan tingkat pendidikan dan upah minimum juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prawira, 2018). Penelitian oleh Prawira menunjukkan bahwa secara simultan tingkat pendidikan dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia antara tahun 2011-2015.

Maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian ini, variabel upah minimum dan tingkat pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau mempunyai hubungan yang kuat terhadap variabel pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Oleh karena itu, perubahan dalam kedua faktor ini dapat saling mempengaruhi dan berkontribusi pada perubahan dalam tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau seperti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di

Kabupaten/Kota Provinsi Riau lebih rendah dari pada pertumbuhan angkatan kerja yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Hal ini menyebabkan ketidakselarasan antara jumlah angkatan kerja yang meningkat dan ketersediaan lapangan kerja. Sehingga banyaknya tenaga kerja baru tidak dapat diserap oleh perekonomian yang tumbuh lebih lambat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data mengenai upah minimum (UMK) dan tingkat pendidikan terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upah minimum (X1) secara parsial mempunyai hubungan yang negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Hal ini berarti naik dan turunnya Upah Minimum (UMK) tidak memiliki dampak pada penurunan pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau.
2. Tingkat pendidikan (X2) secara parsial mempunyai hubungan yang negatif dan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Hal ini berarti apabila tingkat pendidikan yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Riau meningkat, maka akan menurunkan pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau.
3. Upah minimum (X1) dan Tingkat pendidikan (X2) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap pengangguran (Y) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian telah diketahui bahwa variabel yang berpengaruh terhadap pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau adalah upah minimum (UMK) dan tingkat pendidikan. Dengan demikian, adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Riau untuk melakukan penyesuaian upah minimum secara berkala berdasarkan kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja, dikarenakan meningkatnya upah minimum di Kabupaten/Kota Provinsi Riau tidak berpengaruh terhadap penurunan

pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Riau.

2. Investasi dalam pendidikan seperti memberikan beasiswa kepada anak-anak di Kabupaten/Kota Provinsi Riau yang berprestasi dan kurang mampu dan memberikan pelatihan bagi tenaga kerja sangat penting. Dengan meningkatkan keterampilan dan investasi dalam pendidikan, pemerintah dapat membantu tenaga kerja memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh industri, sehingga dapat menurunkan pengangguran yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Riau.
3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas variabel penelitian yang digunakan dan memasukkan variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, R. (2020). *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Arjasa. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/art>
- Al-Faizin, A. W. (2018). *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi Dari Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Gema Insani.
- Aldi Prasetyo Amiru, dkk. (2022). *Indonesia & Mitos Negeri Macan Asia* (p. 114). CV. ALINEA MEDIA DIPANTARA.
- Alfredo Y Mahihody, Daisy S. M. Engka, A. Y. L. (2018). Pengaruh Upah Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Pengangguran Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(3), 24–34.
- Aulia, R. (2020). Pengaruh Pdrb, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2013-2019 Skripsi. *Skripsi*.
- Bawana, I. R. & S. (2007). *Ekonomi 2*. Yudhistira.
- BPS Provinsi Riau. (2022). *PROVINSI RIAU DALAM ANGKA 2022*.
- Cahyani, M., & Marhaeni, A. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Wilayah Sarbagita. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 11(10), 3701. <https://doi.org/10.24843/eep.2022.v11.i10.p01>
- Cahyantini, A. (2024). *Ekonomi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. CV. Gita Lentara.
- Cahyono, I. S. dan H. (2013). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Jombang. *Pendidikan Ekonomi*, 1, 3.
- Daradjat, Z. (2011). *Ilmu Pendidikan Islam*. Bumi Aksara.
- Dewi, R. (2020). Strategi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Dumai Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Di Kota Dumai. *Jom Fisip*, 1–13. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Eviatiwi Kusumaningtiyas, D. (2022). *Konsep dan Praktik Ekonometrika Menggunakan Eviews*. Academia Publication.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gilarso. (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Kanisius.
- Hanri, M. & N. K. S. (2024). Potret Gen Z yang Menganggur: Mengungkap Realita di Balik Angka. *LPEM FEB UI*, 5(ISSN 2808-2060), 9.
- Hastarini Dwi, A. (2005). Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan. *Dinamika Pembangunan*, 2(1), 30–39.
- Hasyim, A. I. (2017). *Ekonomi Makro*. Pren Media.
- Hera Susanti, Moh Ihsan, W. (2000). *Indikator-Indikator Makroekonomi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ikhsan, F. (2003). *Dasar-dasar Kependidikan, cetakan ketiga*. Rineka Cipta.
- Imron Nawawi. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Serang Dalam Persepektif Ekonomi Islam. *Skripsi Ekonomi*.
- Khusnul Khotimah. (2013). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja, Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di Diy Tahun 2009-2015. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Lestari, D. (2015). *Sistem Pengupahan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi FEBI Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Mankiw, G. (2017). *Makro Ekonomi Edisi Revisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. G. (2000). *Pengantar Ekonomi Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. G. (2006). *Makroekonomi Edisi Keenam, terjemahan Fitria Liza, Imam Nurwaman*. Erlangga.
- Mankiw, N. G. (2007). *Makroekonomi (Edisi Keen)*. Erlangga.
- Marhaeni, A. A. I. N., dan Dewi, M. (2004). *Buku Ajar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Marji., Setya Chendra Wibawa., Laili Hidayati., D. F. (2021). *Pasar Kerja Generasi-Z Bidang Vokasi (cetakan 1)*. Cerdas Ulet Kreatif.
- Martono, N. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raya Grafindo. Persada.
- Michael P. Todaro & Stephan C. Smith. (2011). *Pembangunan Ekonomi, edisi kesebelas jilid 1, terjemahan Agus Dharma*. Erlangga.

- Mudrajad. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN.
- Mulyadi. (2003). *Ekonomi SDM Dalam Perspektif Pembangunan*. PT. Grafindo Persada.
- Naf'an. (2014). *Ekonomi Makro, Tinjauan Ekonomi Syariah, cetakan ke 1*. Graha Ilmu.
- Parera, A. (2020). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. PT. Bumi Aksara.
- Prawira, S. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran Terbuka Di Indonesia. *Jurnal Ecogen*, 1(4), 162. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v1i1.4735>
- Purnomo, A. K. (2019). *Pengolahan Riset Ekonomi Jadi Mudah Dengan IBM SPSS*. Surabaya: CV. Jakad Publishing.
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I, Economic Doctrines of Islam, Terjemahkan Soeroyo, dan Nastangin*. PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Rahmat Haikal. (2023). *Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi Dalam Negeri Dan Rasio Perbandingan Gender Terhadap Pengangguran Terbuka Di Indonesia* [Universitas Malikussaleh]. <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/1036>
- Rahmi, J., & Riyanto. (2022). Dampak Upah Minimum Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja: Studi Kasus Industri Manufaktur Indonesia (The Impact of Minimum Wage on Labor Productivity: Evidence from Indonesian Manufacturing Industry). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 13(1), 1–12.
- Riya A.N.D, Ismail A.W, H. L. (2024). Pengaruh Kualitas Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran di Pulau Jawa The Leverage of Education Quality on the Unemployment Rate in Java Island. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial*, 7(1), 26–36. <https://ojs.ejournal.unigoro.com/index.php/JEMeS/article/view/773/582>
- Rusdiana. (2021). *Kebijakan Pendidikan*. Pustaka Tresna Bhakti Press.
- Sapitri, D. (2018). *Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung(2012-2016))*. UIN Raden Intan Lampung.

- Sonny Sumarsono. (2009). *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia edisi pertama*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h.98. Graha Ilmu.
- Sudaryana, B. (2018). *Metode Penelitian Teori dan Praktek, Kualitatif dan Kuantitatif*. CV. Budi Utama.
- Sukirno, S. (2004). *Makroekonomi Teori Pengantar Tiga*. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2013). *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Tiga*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono, S. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia & Ketenagakerjaan*. FE UI.
- Susanto, E., Rochaida, E., & Ulfah, y. (2017). Pengaruh Inflasi Dan Pendidikan Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan. *INOVASI*, 13 (1), 19–27.
- Syaifuddin, dkk. (2023). *Memahami Faktor Penentu dalam Meningkatkan Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan* (C. A. Abimata (ed.)).
- Tirtarahardja, U. (2018). *Pengantar Pendidikan edisi revisi*. Jakarta:RINEKA CIPTA.
- Usman, Ahmadi., Tjare Anugrah Tjambolang., Yyau Meiniza Zainar., S. (2023). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Ekonomi Teori dan Aplikasi* (cetakan pe). PT. Nas Media Indonesia.
- Wiryan, W. G. (2015). *Ironi Upah Minimum Dalam Industri Pariwisata*. Media Nusa Creative. <http://etheses.iainkediri.ac.id/72/3/vii> BAB II.pdf
- Zulfikar Putra, D. W. & F. W. (2022). *Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja*. Ahli Media Press.

Lampiran

1. Data Sebelum Transformasi

Kabupaten/Kota	Tahun	Y (Pengangguran)	X1 (UMK)	X2 (Tingkat Pendidikan)
KUANTAN SINGINGI	2018	6.05	2,597,989.90	8.31
	2019	4.88	2,806,608.49	8.58
	2020	5.21	3,045,450.87	8.59
	2021	2.06	3,091,132.63	8.75
	2022	2.66	3,111,788.95	8.76
	2023	2.49	3,354,275.10	8.9
INDRAGIRI HULU	2018	4.7	2,751,076.40	8.16
	2019	4.96	2,751,076.40	8.17
	2020	4.91	2,985,193.00	8.38
	2021	3.32	2,960,855.00	8.39
	2022	2.53	3,097,706.00	8.4
	2023	2.47	3,364,511.42	8.42
INDRAGIRI HILIR	2018	4.08	2,546,162.14	7.19
	2019	4.76	2,750,618.96	7.22
	2020	4.35	2,984,696.63	7.23
	2021	2.66	2,984,696.63	7.24
	2022	1.5	2,984,696.63	7.26
	2023	1.71	3,241,141.76	7.31
PELALAWAN	2018	5.3	2,561,250.65	8.44
	2019	4.88	2,766,919.08	8.49
	2020	5.99	3,002,383.89	8.5
	2021	2.34	3,002,383.89	8.7
	2022	2.73	3,030,598.54	8.72
	2023	2.26	3,287,623.60	8.73
SIAK	2018	4.13	2,600,614.14	9.64
	2019	4.33	2,809,443.46	9.65
	2020	5.8	3,048,527.10	9.66
	2021	4.34	3,081,146.33	9.86
	2022	6.11	3,114,237.83	9.87
	2023	5.82	3,361,913.16	9.88
KAMPAR	2018	5.45	2,516,638.71	9.1
	2019	5.98	2,718,724.80	9.25
	2020	6.15	2,950,088.28	9.26
	2021	4.27	3,023,840.48	9.27
	2022	3.62	3,047,470.58	9.39

	2023	3.38	3,300,258.26	9.4
ROKAN HULU	2018	5.4	2,525,823.52	8.37
	2019	4.71	2,728,647.15	8.38
	2020	4.42	2,960,855.02	8.39
	2021	2.25	2,960,855.02	8.54
	2022	3.62	2,986,863.49	8.55
	2023	3.45	3,248,333.52	8.81
BENGKALIS	2018	10.05	2,919,458.35	9.21
	2019	9.62	3,005,582.37	9.41
	2020	9.31	3,261,357.42	9.69
	2021	6.63	3,342,891.35	9.7
	2022	7.18	3,350,646.31	9.71
	2023	7.09	3,599,029.72	9.73
ROKAN HILIR	2018	6.09	2,506,141.78	8.15
	2019	4.96	2,707,384.96	8.24
	2020	4.8	2,937,783.42	8.25
	2021	3.25	2,996,539.09	8.26
	2022	4.55	3,009,416.38	8.28
	2023	4.42	3,242,977.19	8.52
KEPULAUAN MERANTI	2018	6.84	2,545,505.06	7.48
	2019	6.19	2,749,909.12	7.51
	2020	7.94	2,983,926.39	7.7
	2021	4.43	2,985,000.00	7.84
	2022	5.5	2,985,000.00	7.88
	2023	5.17	3,224,635.80	7.99
PEKANBARU	2018	8.42	2,557,486.73	11.22
	2019	7.86	2,762,852.91	11.43
	2020	8.56	2,997,971.69	11.68
	2021	8.29	2,997,971.69	11.92
	2022	6.4	3,049,675.79	11.93
	2023	6.2	3,319,023.16	11.94
DUMAI	2018	6.04	2,886,655.44	9.84
	2019	6.47	3,118,453.87	9.85
	2020	8.19	3,383,834.29	10.07
	2021	6.29	3,383,834.29	10.14
	2022	5.38	3,414,160.86	10.15
	2023	5.15	3,723,278.98	10.16

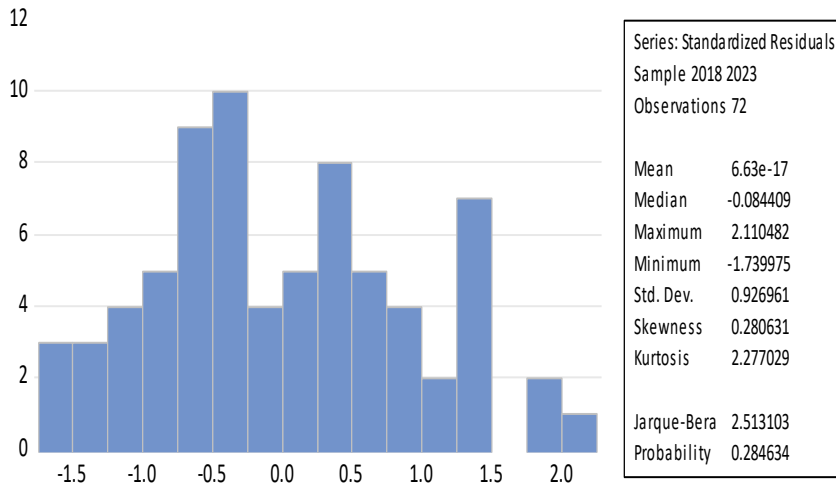
2. Data Hasil Transformasi

Kabupaten/Kota	Tahun	Y (Pengangguran)	X1 (UMK)	(X2) (Tingkat Pendidikan)
KUANTAN SINGINGI	2018	6.05	14.77024859	2.117459609
	2019	4.88	14.84748737	2.149433913
	2020	5.21	14.92915952	2.150598736
	2021	2.06	14.94404813	2.169053700
	2022	2.66	14.95070834	2.170195905
	2023	2.49	15.02574624	2.186051277
INDRAGIRI HULU	2018	4.7	14.82750281	2.099244169
	2019	4.96	14.82750281	2.100468909
	2020	4.91	14.90917496	2.125847914
	2021	3.32	14.90098864	2.127040520
	2022	2.53	14.94617240	2.128231706
	2023	2.47	15.02879332	2.130609828
INDRAGIRI HILIR	2018	4.08	14.75009774	1.972691172
	2019	4.76	14.82733652	1.976854953
	2020	4.35	14.90900867	1.978239036
	2021	2.66	14.90900867	1.979621206
	2022	1.5	14.90900867	1.982379829
	2023	1.71	14.99143622	1.989243274
PELALAWAN	2018	5.3	14.75600623	2.132982309
	2019	4.88	14.83324501	2.138889000
	2020	5.99	14.91491716	2.140066163
	2021	2.34	14.91491716	2.163323026
	2022	2.73	14.92427070	2.165619238
	2023	2.26	15.00567555	2.166765370
SIAK	2018	4.13	14.77125818	2.265921109
	2019	4.33	14.84849696	2.266957915
	2020	5.8	14.93016911	2.267993648
	2021	4.34	14.94081227	2.288486169
	2022	6.11	14.95149500	2.289499853
	2023	5.82	15.02802076	2.290512512
KAMPAR	2018	5.45	14.73843472	2.208274414
	2019	5.98	14.81567350	2.224623552
	2020	6.15	14.89734565	2.225704049
	2021	4.27	14.92203826	2.226783380
	2022	3.62	14.92982249	2.239645293
	2023	3.38	15.00951128	2.240709689

ROKAN HULU	2018	5.4	14.74207771	2.124653885
	2019	4.71	14.81931649	2.125847914
	2020	4.42	14.90098864	2.127040520
	2021	2.25	14.90098864	2.144761008
	2022	3.62	14.90973439	2.145931283
	2023	3.45	14.99365266	2.175887440
BENGKALIS	2018	10.05	14.88690866	2.220289850
	2019	9.62	14.91598191	2.241772954
	2020	9.31	14.99765405	2.271094426
	2021	6.63	15.02234666	2.272125886
	2022	7.18	15.02466381	2.273156282
	2023	7.09	15.09617484	2.275213896
ROKAN HILIR	2018	6.09	14.73425499	2.098017927
	2019	4.96	14.81149377	2.109000344
	2020	4.8	14.89316592	2.110213200
	2021	3.25	14.91296854	2.111424588
	2022	4.55	14.91725672	2.113842968
	2023	4.42	14.99200235	2.142416341
KEPULAUAN MERANTI	2018	6.84	14.74983964	2.012232792
	2019	6.19	14.82707842	2.016235466
	2020	7.94	14.90875057	2.041220329
	2021	4.43	14.90911030	2.059238834
	2022	5.5	14.90911030	2.064327904
	2023	5.17	14.98633057	2.078190760
PEKANBARU	2018	8.42	14.75453559	2.417697900
	2019	7.86	14.83177437	2.436241478
	2020	8.56	14.91344651	2.457877977
	2021	8.29	14.91344651	2.478217662
	2022	6.4	14.93054584	2.479056236
	2023	6.2	15.01518107	2.479894108
DUMAI	2018	6.04	14.87560910	2.286455711
	2019	6.47	14.95284788	2.287471455
	2020	8.19	15.03452003	2.309560707
	2021	6.29	15.03452003	2.316487998
	2022	5.38	15.04344230	2.317473705
	2023	5.15	15.13011528	2.318458442

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



b. Uji Multikolinearitas

	X1	X2
X1	1	0.303063
X2	0.303063	1

c. Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/09/25 Time: 01:34
 Sample: 2018 2023
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 12
 Total panel (balanced) observations: 72

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-7.910428	12.07818	-0.654935	0.5151
X1	0.303590	1.419158	0.213923	0.8314
X2	1.901169	6.615696	0.287372	0.7749

d. Uji Autokorelasi

F-statistic	15.19516	Durbin-Watson stat	1.816388
Prob(F-statistic)	0.000000		

dw= 1.816	
k= 2	
n =72	
dl= 1.5611	hasil:
du= 1.6751	du<dw<4-du
4-dl: 2.4389	1.6751<1.816<2.3249
	LOLOS
4-du: 2.3249	AUTOKORELASI

4. Hasil Penelitian

a. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	10.894666	(11,58)	0.0000
Cross-section Chi-square	80.672306	11	0.0000

b. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	14.734651	2	0.0006

c. FEM

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/09/25 Time: 01:31
 Sample: 2018 2023
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 12
 Total panel (balanced) observations: 72

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	114.4697	23.75547	4.818667	0.0000
X1	-2.939491	2.791212	-1.053124	0.2967
X2	-29.96469	13.01180	-2.302886	0.0249

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.773027	Mean dependent var	5.129167
Adjusted R-squared	0.722154	S.D. dependent var	1.945694
S.E. of regression	1.025597	Akaike info criterion	3.061093
Sum squared resid	61.00727	Schwarz criterion	3.503778
Log likelihood	-96.19934	Hannan-Quinn criter.	3.237327
F-statistic	15.19516	Durbin-Watson stat	1.816388
Prob(F-statistic)	0.000000		

d. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.773027	Mean dependent var	5.129167
Adjusted R-squared	0.722154	S.D. dependent var	1.945694
S.E. of regression	1.025597	Akaike info criterion	3.061093
Sum squared resid	61.00727	Schwarz criterion	3.503778
Log likelihood	-96.19934	Hannan-Quinn criter.	3.237327
F-statistic	15.19516	Durbin-Watson stat	1.816388
Prob(F-statistic)	0.000000		

e. Hasil Uji t

No	Variabel	Nilai Signifikansi (prob)	α	keterangan
1	UMK	0.2967	0,05	TIDAK BERPENGARUH
2	Tingkat Pendidikan	0.0249	0,05	BERPENGARUH

f. Hasil Uji F

	Nilai
F-Statistik	15.19516
Prob (F-Statistik)	0.000000

5. Tabel t

Titik persentase distribusi t (df 41-80)

df	Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
		0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127	
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595	
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089	
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607	
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148	
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710	
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291	
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891	
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508	
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141	
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789	
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451	
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127	
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815	
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515	
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226	
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948	
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680	
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421	
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171	
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930	
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696	
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471	
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253	
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041	
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837	
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639	
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446	
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260	
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079	
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903	
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733	
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567	
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406	
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249	
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096	
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948	
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804	
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663	
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526	

6. Tabel F

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78

7. Tabel Durbin Watson

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
71	1.5865	1.6435	1.5577	1.6733	1.5284	1.7041	1.4987	1.7358	1.4685	1.7685
72	1.5895	1.6457	1.5611	1.6751	1.5323	1.7054	1.5029	1.7366	1.4732	1.7688
73	1.5924	1.6479	1.5645	1.6768	1.5360	1.7067	1.5071	1.7375	1.4778	1.7691
74	1.5953	1.6500	1.5677	1.6785	1.5397	1.7079	1.5112	1.7383	1.4822	1.7694
75	1.5981	1.6521	1.5709	1.6802	1.5432	1.7092	1.5151	1.7390	1.4866	1.7698
76	1.6009	1.6541	1.5740	1.6819	1.5467	1.7104	1.5190	1.7399	1.4909	1.7701
77	1.6036	1.6561	1.5771	1.6835	1.5502	1.7117	1.5228	1.7407	1.4950	1.7704
78	1.6063	1.6581	1.5801	1.6851	1.5535	1.7129	1.5265	1.7415	1.4991	1.7708
79	1.6089	1.6601	1.5830	1.6867	1.5568	1.7141	1.5302	1.7423	1.5031	1.7712
80	1.6114	1.6620	1.5859	1.6882	1.5600	1.7153	1.5337	1.7430	1.5070	1.7716
81	1.6139	1.6639	1.5888	1.6898	1.5632	1.7164	1.5372	1.7438	1.5109	1.7720
82	1.6164	1.6657	1.5915	1.6913	1.5663	1.7176	1.5406	1.7446	1.5146	1.7724
83	1.6188	1.6675	1.5942	1.6928	1.5693	1.7187	1.5440	1.7454	1.5183	1.7728
84	1.6212	1.6693	1.5969	1.6942	1.5723	1.7199	1.5472	1.7462	1.5219	1.7732
85	1.6235	1.6711	1.5995	1.6957	1.5752	1.7210	1.5505	1.7470	1.5254	1.7736
86	1.6258	1.6728	1.6021	1.6971	1.5780	1.7221	1.5536	1.7478	1.5289	1.7740
87	1.6280	1.6745	1.6046	1.6985	1.5808	1.7232	1.5567	1.7485	1.5322	1.7745
88	1.6302	1.6762	1.6071	1.6999	1.5836	1.7243	1.5597	1.7493	1.5356	1.7749
89	1.6324	1.6778	1.6095	1.7013	1.5863	1.7254	1.5627	1.7501	1.5388	1.7754
90	1.6345	1.6794	1.6119	1.7026	1.5889	1.7264	1.5656	1.7508	1.5420	1.7758
91	1.6366	1.6810	1.6143	1.7040	1.5915	1.7275	1.5685	1.7516	1.5452	1.7763
92	1.6387	1.6826	1.6166	1.7053	1.5941	1.7285	1.5713	1.7523	1.5482	1.7767
93	1.6407	1.6841	1.6188	1.7066	1.5966	1.7295	1.5741	1.7531	1.5513	1.7772
94	1.6427	1.6857	1.6211	1.7078	1.5991	1.7306	1.5768	1.7538	1.5542	1.7776
95	1.6447	1.6872	1.6233	1.7091	1.6015	1.7316	1.5795	1.7546	1.5572	1.7781
96	1.6466	1.6887	1.6254	1.7103	1.6039	1.7326	1.5821	1.7553	1.5600	1.7785
97	1.6485	1.6901	1.6275	1.7116	1.6063	1.7335	1.5847	1.7560	1.5628	1.7790
98	1.6504	1.6916	1.6296	1.7128	1.6086	1.7345	1.5872	1.7567	1.5656	1.7795
99	1.6522	1.6930	1.6317	1.7140	1.6108	1.7355	1.5897	1.7575	1.5683	1.7799
100	1.6540	1.6944	1.6337	1.7152	1.6131	1.7364	1.5922	1.7582	1.5710	1.7804
101	1.6558	1.6958	1.6357	1.7163	1.6153	1.7374	1.5946	1.7589	1.5736	1.7809
102	1.6576	1.6971	1.6376	1.7175	1.6174	1.7383	1.5969	1.7596	1.5762	1.7813
103	1.6593	1.6985	1.6396	1.7186	1.6196	1.7392	1.5993	1.7603	1.5788	1.7818
104	1.6610	1.6998	1.6415	1.7198	1.6217	1.7402	1.6016	1.7610	1.5813	1.7823
105	1.6627	1.7011	1.6433	1.7209	1.6237	1.7411	1.6038	1.7617	1.5837	1.7827
106	1.6644	1.7024	1.6452	1.7220	1.6258	1.7420	1.6061	1.7624	1.5861	1.7832
107	1.6660	1.7037	1.6470	1.7231	1.6277	1.7428	1.6083	1.7631	1.5885	1.7837
108	1.6676	1.7050	1.6488	1.7241	1.6297	1.7437	1.6104	1.7637	1.5909	1.7841
109	1.6692	1.7062	1.6505	1.7252	1.6317	1.7446	1.6125	1.7644	1.5932	1.7846
110	1.6708	1.7074	1.6523	1.7262	1.6336	1.7455	1.6146	1.7651	1.5955	1.7851
111	1.6723	1.7086	1.6540	1.7273	1.6355	1.7463	1.6167	1.7657	1.5977	1.7855
112	1.6738	1.7098	1.6557	1.7283	1.6373	1.7472	1.6187	1.7664	1.5999	1.7860
113	1.6753	1.7110	1.6574	1.7293	1.6391	1.7480	1.6207	1.7670	1.6021	1.7864
114	1.6768	1.7122	1.6590	1.7303	1.6410	1.7488	1.6227	1.7677	1.6042	1.7869